

**KEDERMAWANAN KAPITALIS PRAKTIK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: SEBUAH TINJAUAN KRITIS DENGAN  
*SYARIAH ENTERPRISE THEORY***



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

*Oleh:*

**ANDI FACHRUL ALAMSYAH**

**10800112075**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Fachrul Alamsyah  
NIM : 10800112075  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang / 07 Juni 1994  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi  
Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam  
Alamat : JL. Toddopuli IV No. 33, Kec. Panakuk kang,  
Makassar  
Judul : Kedermawanan Kapitalis Praktik *Corporate Social Responsibility*: sebuah Tinjauan Kritis dengan *Shari'ah Enterprise Theory*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Maret 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUD DIN**  
ANDI FACHRUL ALAMSYAH  
**10800112075**  
M A K A S S A R



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I Jl. Slt Alauddin No.63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Yasin Limpo Samata Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul, "**Kedermawanan Kapitalis Praktik *Corporate Social Responsibility*: Sebuah Tinjauan Kritis dengan *Shariah Enterprise Theory***", yang disusun oleh **Andi Fachrul Alamsyah NIM: 10800112075**, mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2017 M, bertepatan dengan 3 Rajab 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Gowa, 26 April 2017 M


29 Rajab 1438 H

**DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Andi Wawo, SE., Ak	(.....)
Penguji II	: Dr. Amiruddin K, M.El	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak	(.....)
Pembimbing II	: Ana Mardiana, S.Pd., M.Si., Ak	(.....)

**Diketahui oleh:**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**UIN Alauddin Makassar,**

  
**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag**  
**NIP: 19581022 198703 1 002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk berpikir yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi panutan sempurna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Skripsi dengan judul : **“Kedermawanan Kapitalis Praktik *Corporate Social Responsibility*: sebuah Tinjauan Kritis dengan *Shari'ah Enterprise Theory*”** penulis hadirkan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materiil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Andi Ruslan Azis dan Ibunda Nurlaila Yusran yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Jamaluddin Madjid, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Memen Suwandi selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Wahyuddin Abdullah, S.E, M.Si, Ak selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Ana Mardiana, S.Pd, M.Si, Ak selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, arahan serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Sahabat-sahabatku Nur Ilham, Ahmad Dzauqy AR, Yun Ermala Dewi, A. Rifqa Arifadinah dan teman-teman angkatan 2012 Akuntansi UIN Alauddin Makassar yang selama ini memberikan banyak motivasi, bantuan dan telah menjadi teman diskusi yang hebat bagi penulis.
7. Seluruh mahasiswa jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar, kakak-kakak dan adik-adik yang tercinta atas segala kebersamaan dan persaudaraan yang terus dijaga.
8. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis,

**ANDI FACHRUL ALAMSYAH**  
**10800112075**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-11</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN TEORETIS.....</b>	<b>12-41</b>
A. <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	12
B. Prinsip Berbagi dengan Adil .....	16
C. <i>Social Contract Theory</i> .....	17
D. <i>Critical Accounting Study</i> .....	20
E. <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	24
F. Kedermawanan Kapitalis .....	30
G. Kedermawanan Kapitalis dalam Bingkai <i>Corporae Social Responsibility</i> .....	32
H. Rerangka Konseptual .....	40
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>42-49</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data Penelitian .....	43

D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
G. Pengujian Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50-85</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	50
B. Pengungkapan Aspek Ekonomi Perusahaan .....	55
C. Pengungkapan Aspek Sosial Perusahaan .....	60
D. Pengungkapan Aspek Lingkungan Perusahaan .....	69
E. Realitas <i>Corporate Social Responsibility</i> yang Membangkitkan Kapitalis dalam Perspektif <i>Shariah</i> <i>Enterprise Theory</i> .....	74
F. Realitas <i>Corporate Social Responsibility</i> Perusahaan Menurut <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	80
G. Pengajuan Ide dan Pencerahan .....	84
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>86-89</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Implikasi Penelitian.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90-94</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90-94</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Konseptual .....	41
--	----





## ABSTRAK

**Nama** : Andi Fachrul Alamsyah  
**Nim** : 10800112075  
**Judul** : **Kedermawanan Kapitalis Praktik Corporate Social Responsibility: Sebuah Tinjauan Kritis dengan Shariah Enterprise Theory**

---

Penelitian ini mengkaji tentang kegiatan CSR yang digunakan sebagai strategi bisnis untuk mendapat perhatian dari masyarakat sekitar. Adapun perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang terdaftar di IDX yang bergerak dibidang migas dan memiliki *sustainability report*.. Panduan pelaporan *sustainability report* yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI) mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan dampak dari aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasi perusahaan. Konsep kapitalis menekankan pada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari seluruh usaha yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis *radical humanism* yang menggunakan analisis semiotik untuk memahami makna yang terkandung dari bahasa tertuang dalam *sustainability report* lalu kemudian menganalisisnya dengan *shariah enterprise theory* dan pendekatan Al-Quran dalam memandang praktik CSR perusahaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik CSR yang dituangkan dalam *sustainability report* PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dinilai sebagai praktik CSR positif dan telah memahami realitas keberlanjutan sebagai *humanism sustainability*. Di sisi lain, praktik CSR dalam *sustainability report* PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dinilai sebagai praktik CSR positif dan memahami realitas keberlanjutan sebagai *obligatory sustainability* namun masih memiliki unsur negatif yang mengarah pada kapitalis. Sedangkan PT Freeport Indonesia dinilai sebagai praktik CSR negatif yang mengarah kapitalis dan memahami realitas keberlanjutan sebagai *pseudo sustainability*.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya perusahaan menerapkan etika bisnis Islam dalam operasi dan berusaha menumbuhkan nilai-nilai berbasis kesadaran dalam beraktivitas sehingga keberlanjutan dapat dipahami sebagai nilai-nilai humanis.

**Kata Kunci:** *CSR, Kapitalis, Kedermawanan Kapitalis, Shariah Enterprise Theory.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan isu keberlanjutan (*sustainability*) dan meningkatnya tuntutan masyarakat luas terhadap akuntabilitas bisnis dan praktik bisnis yang lebih etis, praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) semakin berkembang dan menjadi komponen dari strategi korporasi dan instrumen yang krusial untuk meminimalisasi konflik di antara para *stakeholder* (Becchetti *et al.*, 2012). Perusahaan diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui peran strategis dan kompetitif dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Dincer, 2011) sehingga investasi dalam *corporate social responsibility* (CSR) perlu dipertimbangkan menjadi bagian dari kebijakan dan strategi perusahaan. Handerson dan Peirson (2004) menjelaskan bahwa pelaporan sosial dan lingkungan adalah sebuah aspek pembangunan berkelanjutan yang mencerminkan keprihatinan tentang perlindungan lingkungan, kesetaraan *intergenerational*, bumi dan sumber daya.

Dari sisi *shariah enterprise theory* kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada Tuhan, manusia, dan alam. Perusahaan ingin menjaga *stakeholders*-nya salah satunya masyarakat itu dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Pemenuhan kebutuhan ini sendiri bertujuan agar masyarakat memiliki pandangan yang baik terhadap perusahaan.

Di Indonesia kegiatan CSR wajib untuk dilakukan oleh perusahaan tertentu. Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan yang berbasis sumber daya alam menyisihkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (Susanto, 2007). Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”, dengan demikian CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan, bukan kegiatan yang bersifat sukarela. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun juga mewajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Penerapan CSR lazimnya banyak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam seperti batubara, migas, manufaktur, dan lain-lain, karena pada dasarnya perusahaan tersebut memiliki dampak terhadap keadaan lingkungan dan sosial masyarakat. CSR diterapkan oleh beberapa perusahaan untuk membantu meminimalisir dampak yang diakibatkan agar perusahaan tersebut dapat diterima secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar, jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atas dasar inisiatif sendiri. Kegiatan CSR yang diterapkan tersebut juga tidak semena-mena hanya untuk membantu meminimalisir dampak dari aktivitas yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut, melainkan dapat digunakan sebagai strategi bisnis untuk mendapat perhatian dari masyarakat sekitar.

Letmathe (2009) yang melakukan penelitian dengan melihat praktik CSR di Amerika Latin menghasilkan kesimpulan antara lain; (1) *corporate social responsibility* merupakan bagian yang integral dengan bisnis perusahaan dan dibentuk dari strategi investasi yang dilakukan oleh perusahaan, (2) bisnis selalu dapat dipastikan memberikan efek dari segi sosial dan lingkungan baik positif maupun negatif dari setiap rantai nilai operasi yang dijalankan oleh perusahaan, (3) efek dari *value chain* dan konteks investasi (*contextual investments*) menjadi menjadi dasar tanggungjawab perusahaan, dan (4) CSR sebagai bagian (*core*) dari strategi bisnis perusahaan diharapkan menciptakan nilai bagi perusahaan dan lingkungan. Penelitian ini di dukung oleh Gulsevim dan Gokhan (2009), yang menyebutkan bahwa program CSR yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan reputasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) perusahaan.

PT Freeport Indonesia sejak beroperasinya tak pernah luput dari sorotan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah sisa tambang atau *tailing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2011 lalu, di mana kandungan logam berat dalam air sungai Ajkwa dan sungai Otomona, tempat mengalirkan limbah tambang PTFI masih berada di bawah ambang batas standar lingkungan yang ditentukan oleh Pemerintah. Namun, penelitian yang dilakukan PT Santika Consulindo, menyatakan bahwa telah terjadi dampak cemaran dari polusi logam berat seperti timbal (Pb) dan Mangan (Mg) yang telah melebihi batas baku mutu air untuk biota sesuai PerMENLH Nomor 51 Tahun 2004 ([regional.kompas.com](http://regional.kompas.com)).

Terkait dengan kerusakan lingkungan, jurnalis *New York Times* (Perez dan Bonner) melakukan investigasi, dalam artikelnya di *New York Times* menyebutkan bahwa media pembuangan tailing limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang ditumpahkan PTFI telah mencapai pesisir laut Arafura. Tailing yang dibuang melampaui baku mutu *total suspended solid* (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia. Demikian pula audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix, menemukan bahwa tailing dan batuan limbah PTFI merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam yang berbahaya bagi kehidupan akuatik. Bahkan sejumlah spesies akuatik sensitif di Sungai Ajkwa telah punah akibat tailing dan batuan limbah PTFI (antaranews.com).

Perusahaan yang hanya berfokus untuk mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam, dan melupakan tanggung jawab sosial akan dipandang buruk oleh masyarakat, dan melanggar hukum. Demi kepentingan itu, setiap perusahaan yang bergerak di sektor industri sumber daya alam seperti batubara, migas, manufaktur, dan lain-lain, hendaknya melakukan suatu program CSR, program ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di daerah di mana korporasi migas itu berdiri. Tujuan yang sama mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Konsep kapitalis menekankan pada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari seluruh usaha yang dilakukan. Konsep ini pada perkembangannya tidak terbatas pada usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan saja, namun mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Definisi

“seluruh” di sini berarti adalah aktivitas apapun yang dilaksanakan sebuah perusahaan berujung pada tujuan utama kapitalisme, yaitu keuntungan. Membahas keuntungan sendiri, dapat digeneralisir bahwa keuntungan tidak harus berupa keuntungan berupa materi. Citra positif di mata konsumen dan masyarakat juga merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis tertarik menulis tentang **Kedermawanan Kapitalis Praktik *Corporate Social Responsibility*: Sebuah Tinjauan Kritis dengan *Shari'ah Enterprise Theory*.**

#### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian ini adalah laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dari perusahaan pertambangan dan energi minyak dan gas (migas) yang beroperasi di Indonesia. Adapun panduan pelaporan *sustainability report* dari GRI dan berita di media terkait aktivitas perusahaan digunakan sebagai data-data pendukung penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan dan migas yang beroperasi di Indonesia dengan menggunakan laporan *sustainability report* perusahaan pada tahun 2014-2015. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam, bukan untuk generalisasi. Adapun perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini adalah :

1. PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
2. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
3. PT Freeport Indonesia

Dipilihnya perusahaan pertambangan dan migas dalam penelitian ini dengan alasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Arwan (2007) karena pertambangan merupakan salah satu aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang telah dimulai sejak dahulu dan berlanjut hingga sekarang. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ini memang sangat besar, khususnya dalam aspek ekonomi. Kendati demikian kerugian yang akan muncul adalah lebih besar dari keuntungan yang telah diperoleh, jika dampak kerusakan yang ditimbulkan dibiarkan tanpa upaya perbaikan.

Tedi (2013) menambahkan bahwa setiap aktivitas penambangan apapun bentuknya pasti tidak lepas dari persoalan lingkungan hidup. Karena, kapan dan dimana pun kegiatan penambangan itu dilakukan, pasti akan bersentuhan langsung lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Dalam realitas seperti ini wajar saja apa bila proses interaksi yang terjadi kemudian berhadapan dengan berbagai persoalan, baik persoalan lingkungan hidup itu sendiri maupun persoalan sosial kemasyarakatan lainnya.

Banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan memunculkan banyak reaksi dari masyarakat, bahkan tak sedikit masyarakat melakukan perlawanan terhadap kerusakan yang dilakukan perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisasi dampak buruk yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perusahaan mengelola lingkungan hidup serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu, diharapkan pula adanya upaya yang berlandaskan kesadaran perusahaan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan misalnya pengelolaan bahan kimia dan limbah-limbah dari aktivitas operasi

perusahaan. Perhatian terhadap warga sekitar juga diharapkan untuk menjaga interaksi sosial perusahaan dengan masyarakat tempat dimana perusahaan beroperasi misalnya dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan hingga keamanan. Upaya-upaya tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan perusahaan karena adanya aturan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kondisi sosial, tapi juga diharapkan sebagai bentuk kesadaran perusahaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mengarah pada pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*).

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah terbentuk setelah peneliti menetapkan batasan masalah. Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah disebut juga dengan fokus penelitian. Rumusan masalah atau fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2008) rumusan masalah atau fokus penelitian deskriptif adalah: “suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam”.

Berlandas dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kedermawanan kapitalis dibalik praktik *corporate social responsibility* yang dijalankan oleh perusahaan?
2. Bagaimana *shari'ah enterprise theory* memandang realitas kapitalisme pada praktik *corporate social responsibility* yang dijalankan perusahaan?

### **D. Kajian Pustaka**



Penelitian terdahulu yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini adalah penelitian Peter Brebeck-Letmathe, *et al.* (2009), Linda dan Jenny (2008), Asongu (2007), dan Dewi, dkk (2011). Penelitian Peter Brabeck-Letmathe Chairman & CEO, Nestle and Mark Kramer (2009), menyebutkan bahwa: *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian yang integral dengan bisnis perusahaan dan dibentuk dari strategi investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Bisnis selalu dapat dipastikan memberikan efek dari segi sosial dan lingkungan baik positif maupun negatif dari setiap rantai nilai operasi yang dijalankan oleh perusahaan.

Linda dan Jenny (2008), dalam penelitian ini disebutkan *Corporate Social Responsibility* dipandang dari sisi strategi perusahaan, terdiri dari dua tahap yang harus dilaksanakan yaitu: pengembangan strategi (*strategy development*) dan penerapan strategi (*strategic implementation*). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asongu (2007) dimana kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitiannya antara lain:

- a. Penelitian mendukung pandangan *Corporate Social Responsibility* digunakan sebagai alat pemasaran yang baik yang dapat diaplikasikan sebagai strategi.
- b. Motivasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bagian dari strategi harus didasarkan pada prinsip naturalis bukan karena terpaksa.

Dewi, dkk (2011) melakukan penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai realitas “*sustainability*” yang terefleksi dalam praktik *sustainability reporting* pada BUMN sektor pertambangan yang *go public* di Bursa Efek

Indonesia, yaitu (1) PT Aneka Tambang, Tbk (Antam), (2) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA), dan (3) PT Timah, Tbk (TINS). Paradigma yang digunakan dalam penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian akuntansi terdahulu yang menggunakan *legitimacy theory* sebagai alat analisis. Adapun pisau analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode dialektika kritis atas dokumen sebagai upaya merefleksikan realitas “*sustainability*” dalam praktik *sustainability reporting* menurut perspektif paradigma bahasa Habermas yang dipahami sebagai: (1) keberlanjutan semu (*pseudo sustainability*); (2) keberlanjutan wajib (*obligatory sustainability*); dan (3) keberlanjutan humanis (*humanism sustainability*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas “*sustainability*” dipahami sebagai *obligatory sustainability* dan *humanism sustainability*. Realitas “*sustainability*” yang baru dipahami sebatas pada *obligatory sustainability* akan sejalan dengan esensi *legitimacy theory* yang sarat akan nilai-nilai kapitalistik. Sementara itu, realitas “*sustainability*” yang telah dipahami sebagai *humanism sustainability* akan sejalan dengan pandangan paradigma bahasa Habermas yang dapat menyeimbangkan peran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai humanis.

Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa adanya CSR bermanfaat bagi meningkatnya reputasi perusahaan di mata publik, sebaik reputasi dalam komunitas bisnisnya. Namun, kendala yang dihadapi dalam menjalankan program CSR adalah masih adanya pemikiran sebagian anggota masyarakat bahwa CSR adalah sumbangan sehingga tidak memerlukan kesinambungan program dan

akuntabilitas yang baik. Kendala ini coba diatasi dengan mengintensifkan komunikasi dan menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang CSR sebagai bentuk interaksi yang sehat dan saling menguntungkan antara Perseroan dengan pemangku kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan perusahaan terhadap kegiatan CSR adalah bukan hanya sekadar kegiatan *philanthropy* melainkan sesuatu yang berkesinambungan.

#### ***E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ulasan rumusan masalah di atas, maka penulis uraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk kedermawanan kapitalis dalam praktik *corporate social responsibility* yang dijalankan oleh perusahaan.
- 2) Untuk mengetahui kajian *shari'ah enterprise theory* dalam memandang realitas praktik *corporate social responsibility* yang dijalankan oleh perusahaan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat menyempurnakan teori kontrak sosial (*social contract theory*), dimana dalam teori tersebut masih mengarah ke prinsip kapitalis yang hanya menempatkan alam dan manusia sebagai sumber *stakeholders*-nya. Selain itu, penelitian

ini diharapkan dapat menyempurnakan teori-teori yang berkaitan dengan CSR, dimana teori-teori tersebut masih mengandung unsur kapitalisme yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

## 2) Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan inovasi dan inspirasi bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan khususnya batubara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral dalam mengembangkan program CSR yang sedang berjalan. Praktik CSR dalam konteks ini tidak hanya membangun citra positif perusahaan melalui realitas praktik CSR yang dituangkan oleh pihak manajemen melalui *sustainability report*, namun juga sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.

## 3) Manfaat Regulasi

Secara regulasi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengembangan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, karena saat ini masih banyak kerancuan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu menyempurnakan regulasi-regulasi pemerintah terkait dengan tanggung jawab sosial.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Shariah Enterprise Theory*

*Shariah Enterprise Theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory*, seperti telah dibahas oleh Meutia (2010), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. *Enterprise theory*, menurut Triyuwono (2003), mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*), hal yang tidak mampu dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders* (Triyuwono, 2003). Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2003, h. 83) bahwa “diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari’ah sangat direkomendasikan, mengingat syari’ah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.” Namun demikian, menurut Slamet (2001), *enterprise theory* masih perlu diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam.

*Shariah enterprise theory* dapat dikatakan merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris

untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia materil menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non materil. Aspek non materil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai Ilahi.

*Knowledge*, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa tindakan rasional merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek. Terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya. Hubungan ini disebut hubungan “*abduh*” (*obey, obedient, penghambaan*). Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumber daya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan *mardhatillah* (ridho/ijin Allah). Tujuan ini dapat dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi seluruh isi alam).

Nilai-nilai spiritual seperti yang dijelaskan di atas yaitu, *abduh*, *mardhatillah*, dan *rahmatan lil alamin*, merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam *shariah enterprise theory*. *Enterprise theory*, menurut Triyuwono (2003), mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*). Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi

berada di satu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders* (Triyuwono, 2003). Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Namun demikian, menurut Slamet (2001), *enterprise theory* masih perlu diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam.

*Shariah enterprise theory* mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia (2010), adalah:

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama.
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct, indirect, dan alam*) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*.
3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi perusahaan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.

Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

Selain itu, *shariah enterprise theory* mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan item yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Karakteristik-karakteristik ini, menurut Meutia (2010), adalah:

1. Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam.
2. Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan.
3. Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh.

Meutia (2010) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *shariah enterprise theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dimensi-dimensi tersebut, menurut Meutia (2010), adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini, dinyatakan oleh Meutia (2010), ditujukan hanya kepada Tuhan. Sedangkan akuntabilitas horizontal, menurut Meutia (2010), ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah pelanggan dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* menurut *shariah enterprise theory* adalah komunitas.



## B. Prinsip Berbagi dengan Adil

Kata berbagi dalam Islam dinyatakan dalam banyak perintah Tuhan melalui zakat, infak, dan sedekah (Meutia, 2010). Konsep ini, menurut Meutia (2010), mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Tuhan yang lain. Dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah yang mengingatkan manusia untuk berbagi kepada sesama, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً  
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al Baqarah: 254)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

“...(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al Anfal: 3)

Menurut Meutia (2010), berbagi bermakna memberikan apa yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Selain itu, menurut Meutia (2010), berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan *amar ma’ruf nahi munkar* (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik tanggung jawab sosial, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung

program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

### **C. *Social Contract Theory* (Teori Kontrak Sosial)**

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing (Nor Hadi, 2011: 96).

*Social contract* dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (*society*). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang *legitimate* (Deegan, 2002). Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan anggotanya.

Hal ini sejalan dengan konsep *legitimacy theory* bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat keseuaian antara keberadaan perusahaan yang tidak mengganggu atau sesuai (*congruence*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan *et al*, 2002).

Jika ditelusuri, teori kontrak social (*social contract*) dalam buku Nor Hadi (2011) berakar dari karya pemikiran Plato, *The Republic* (427SM-347SM). Thomas Hobbes (1588-1679) memformalisasikan secara eksplisit konsep social contract theory pada sekitar abad 17 dalam karyanya yang berjudul *Leviathan*. Konsep tersebut lebih lanjut dikembangkan oleh John Locke (1636-1704) mengatakan pada dasarnya bentuk dan dasar lingkungan social bersifat *apolitical*, dimana pelaku social memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah teratur (Chariri Anis, 2007) dalam buku Nor Hadi (2011:96). Keteraturan hukum alam tersebut, masyarakat berkewajiban memlihara lewat kontrak sosial untuk mencegah individu agar tidak menyimpang dan melanggar hukum tersebut.

J.J Rousseau (1762) dalam buku Nor Hadi (2011:96) berpendapat bahwa alam bukanlah wujud dari konflik, melainkan memberikan hak kebebasan bagi individu-individu untuk berbuat secara kreatif. Kontrak social (*social contract*) dibuat sebagai media untuk mengatur tatanan (pranata) social kehidupan masyarakat. J. J Rousseau menyatakan:

*“....Social Contract Which was desgined to explain-and therefore legitimate-the relationship between and individual and society and its government.”*

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa secara *volunteer* individu harus menaati perintah, sementara pemerintah harus mampu mengatur agar terjadi peningkatan *good citizenship*.

Shocker dan Sethi dalam Mousa dan Naser (2015: 42) menjelaskan konsep kontrak sosial (*social contract*) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial didasarkan pada:

1. Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
2. Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.

Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya *power* institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus melebarkan tanggungjawabnya tidak hanya sekedar *economic responsibility* yang lebih diarahkan kepada *shareholder* (pemilik perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku (*legal responsibility*). Di samping itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggungjawab kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (*societal respobsibility*).

#### **D. Critical Accounting Study**

*Critical accounting study* dikembangkan oleh Sawarjuwono (2005: 89-90).

Ia menjelaskan bahwa *critical accounting study* adalah suatu studi yang mempunyai tujuan ganda, yaitu memahami suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri. Ia menambahkan bahwa studi ini melihat akuntansi secara luas, bukan hanya sebagai *technical skills* (pengetahuan debit dan kredit), melainkan melihat akuntansi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang selalu terkait dengan manusia sebagai pencipta, pemakai dan perubah akuntansi. Secara lebih spesifik, ia menjelaskan bahwa studi ini melihat praktik akuntansi sebagai suatu ilmu pengetahuan dalam hubungannya dengan manusia pelaku akuntansi (organisasi) dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi, misalnya keadaan ekonomi, politik, sosial, budaya, norma-norma dan segala peraturan yang ada, baik pemerintah maupun organisasi profesi akuntan. Dengan lain perkataan, segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik bisnis bisa dianggap sebagai bagian dari akuntansi. Sehingga apa yang dimaksud akuntansi dalam studi ini menjadi lebih luas dari semua definisi akuntansi yang pernah ditulis oleh para ahli.

Sawarjuwono (2005: 90) kemudian menjelaskan landasan berpikir dan asumsi-asumsi yang mendasari adalah pengetahuan sosial yang yakin bahwa pengetahuan sosial itu keberadaannya dipengaruhi oleh konsep berpikir dan hasil interpretasi nalar yang tidak terlepas dari pengaruh tata-nilai (*it is not value free*) dan kepentingan (*interest*). Setiap individu menciptakan (*produce*), membentuk

(*construct*), mempertahankan (*sustain*) dan merubah (*change*) melalui interaksi sosial, dalam hal ini interaksi melalui bahasa dan budaya. Karena, menurut Gadamer, bahasa adalah wahana antara pengalaman nyata, tradisi, dan proses pemahaman (Hirschheim, 1985 dalam Sawarjuwono, 2005:90). Maka dari itu, realita sosial itu bervariasi selaras dengan bervariasinya bahasa dan budaya. Sebagai konsekuensinya, interaksi sosial masing-masing individu harus dipahami secara totalitas.

Jadi untuk memperoleh pengetahuan yang sempurna, Sawarjuwono (2005: 90) menjelaskan bahwa akuntansi harus dipelajari dengan cara ini, bukan secara *partial*. Dengan lain perkataan, *critical accounting study* adalah suatu pendekatan ilmu pengetahuan akuntansi yang menitik beratkan peran manusia sebagai pelaku akuntansi dengan cara/berusaha mengakomodasikan seluruh kebiasaan/kenyataan sosial yang melingkupi dan mempengaruhi praktik akuntansi itu sendiri. Namun, pendekatan *critical* tidak berhenti sampai taraf memperoleh ilmu pengetahuan, ia akan terus berupaya untuk mengajukan suatu usulan positif guna memperbaiki keadaan pada obyek yang sedang dipelajari (*continuous improvement*).

Sawarjuwono (2005: 91) menguraikan kompleksitas studi ini yang dapat dijelaskan dalam tiga poin, yaitu:

1. Studi ini melihat praktik akuntansi sebagai bahasa, khususnya bahasa bisnis. Untuk memahami makna bahasa, studi ini menyelami/mendalami (*to delve into*) filosofi bahasa. Studi ini melihat bahwa artikulasi praktik akuntansi oleh para pelaku akuntansi mengikuti tatanan bahasa.

Kemampuan berbicara pemakai bahasa akan berubah selaras dengan perubahan pengetahuannya.

2. Perubahan kemampuan berbahasa mengikuti proses interaksi sosial. Oleh karena itu, studi ini melacak lebih jauh ke ilmu-ilmu sosial yang menjelaskan proses interaksi sosial. Namun demikian, pemilihan ilmu sosial yang akan digunakan juga dicari yang berlandaskan paradigma bahasa, dalam hal ini, *The Theory of Communicative Action*, oleh Jurgen Habermas. Pelacakan berdasarkan teori interaksi sosial ini merupakan kompleksitas yang kedua.
3. Kompleksitas ketiga yaitu pemilihan metodologinya. Studi ini berpendapat bahwa metodologi merupakan rangkaian kegiatan berpikir secara ontologis yang bersamaan dengan pemikiran secara epistemologi sehingga melahirkan suatu pengetahuan (Tjiptohadi, 1995 dalam Sawarjuwono, 2005: 91). Jadi pemilihan metodologi untuk menjawab permasalahan riset (*research question*) harus mencerminkan asumsi-asumsi ontologi dan epistemologi peneliti.

Proses berpikir tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa studi ini untuk mencari atau merangkum beberapa metodologi penelitian, khususnya yang dilandasi atau yang berada pada paradigma *hermeneutic*, khususnya paradigma *critical*. Sehingga konsep pemecahannya juga didasarkan pada konsep yang berada pada paradigma bahasa. Dengan lain perkataan, metodologi yang digunakan untuk menjawab *research question* dan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian juga harus seirama dengan paradigma bahasa. Pemikiran inilah

yang membawa studi ini kepada pemilihan *critical accounting study* sebagai suatu metodologi yang relatif baru di dunia akuntansi.

Dewi,dkk (2011: 12) menjelaskan bahwa sintesa pemahaman makna atas realitas “*sustainability*” yang terefleksi dalam praktik *sustainability report* dilakukan dengan berefleksi pada paradigma bahasa Habermas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan semu (*pseudo sustainability*), mengandung makna bahwa realitas “*sustainability*” dipahami sesuai esensi *legitimacy theory* yang lebih merefleksikan peran manusia sebagai makhluk individu yang bersifat egois (*self interest*) sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai kapitalistik dan cenderung melupakan peran manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat alturistik (*collective interest*).
- b. Keberlanjutan wajib (*obligatory sustainability*), mengandung makna bahwa realitas “*sustainability*” dipahami sesuai esensi *legitimacy theory* yang lebih merefleksikan peran manusia sebagai makhluk individu yang memiliki sifat egois (*self interest*) sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai kapitalistik dan cenderung melupakan peran manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat alturistik (*collective interest*). Namun, sifat egois manusia yang berorientasi pada laba maksimal telah diimbangi oleh adanya kemampuan untuk menaati peraturan yang ada.
- c. Keberlanjutan humanis (*humanism sustainability*), mengandung makna bahwa realitas “*sustainability*” dipahami sesuai dengan pandangan paradigma bahasa Habermas yang telah dapat merefleksikan dan



menyeimbangkan peran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai humanis.

#### ***E. Corporate Social Responsibility (CSR)***

Lester Thurow, tahun 1966 dalam bukunya “*The Future of Capitalism*”, sudah memprediksikan bahwa pada saatnya nanti, kapitalisme akan berjalan kencang tanpa perlawanan. Hal ini disebabkan, musuh utamanya, sosialisme dan komunisme telah lenyap. Pemikiran Thurow ini menggaris bawahi bahwa kapitalisme tak hanya berurusan pada ekonomi semata, melainkan juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan untuk membangun masyarakat, atau yang kemudian disebut *sustainable society*. Pada jamannya, pemikiran Thurow tersebut sulit diaplikasikan, hal ini ia tuliskan seperti *there is no social ‘must’ in capitalism*.

Jaman pun berlalu, tahun 1962, Rachel Calson lewat bukunya “*The Silent Spring*”, memaparkan pada dunia tentang kerusakan lingkungan dan kehidupan yang diakibatkan oleh racun peptisida yang mematikan. Paparan yang disampaikan dalam buku “*Silent Spring*” tersebut menggugah kesadaran banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju kehancuran bersama. Dari sini CSR (*Corporate Social Responsibility*) pun mulai digaungkan. Tepatnya di era 1970-an. Banyak professor menulis buku tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, di samping kegiatan mengeruk untung. Buku-buku tersebut antara lain; “*Beyond the Bottom Line*” karya Prof. Courtney C. Brown, orang pertama penerima gelar *Professor of Public Policy and Business Responsibility* dari Universitas Columbia.

Pemikiran para ilmuwan sosial di era itu masih banyak mendapatkan tentangan, hingga akhirnya muncul buku yang menghebohkan dunia hasil pemikiran para intelektual dari *Club of Roma*, bertajuk “*The Limits to Growth*”. Buku ini mengingatkan bahwa, disatu sisi bumi memiliki keterbatasan daya dukung (*carrying capacity*), sementara di sisi lain populasi manusia bertumbuh secara eksponensial. Karena itu, eksploitasi sumber daya alam mesti dilakukan secara cermat agar pembangunan dapat berkelanjutan.

Era 1980–1990, pemikiran dan perbincangan tentang isu ini terus berkembang, kesadaran dalam berbagi keuntungan untuk tanggung jawab sosial, dan dikenal sebagai *community development*. Hasil menggembirakan datang dari KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menegaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang harus diperhatikan, tidak saja oleh negara, terlebih lagi oleh kalangan korporasi yang diprediksi bakal melesatkan kapitalisme di masa mendatang.

Dari sini konsep CSR terus bergulir, berkembang dan diaplikasikan dalam berbagai bentuk. James Collins dan Jerry Poras dalam bukunya *Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies* (1994), menyampaikan bukti bahwa perusahaan yang terus hidup adalah yang tidak semata mencetak limpahan uang saja, tetapi perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungan sosial dan turut andil dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Konsep dan pemikiran senada juga ditawarkan oleh John Elkington lewat bukunya yang berjudul “*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. Dalam bukunya ini, Elkington menawarkan solusi bagi

peusahaan untuk berkembang di masa mendatang, di mana mereka harus memperhatikan 3P, bukan sekedar keuntungan (*Profit*), juga harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat (*People*) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*). Agenda *World Summit* di Johannesburg (2002), menekankan pentingnya tanggung jawab social perusahaan. Dari situ program CSR mulai terus berjalan dan berkembang dengan berbagai konsep dan definisi. Kesadaran menjalankan CSR akhirnya tumbuh menjadi *trend* global, terutama produk-produk yang ramah lingkungan yang diproduksi dengan memperhatikan kaidah sosial dan hak asasi manusia.

Di pasar modal global pun, CSR juga menjadi faktor yang diperhitungkan. Misalnya *New York Stock Exchange* (NYSE) saat ini menerapkan program *Dow Jones Sustainable Index* (DJSI) untuk saham perusahaan yang dikategorikan memiliki *Social Responsible Investment* (SRI). Kemudian *Index and Financial Times Stock Exchange* (FTSE) menerapkan *FTSE4 Good* sejak 2001. Konsekuensi dari adanya index-index tersebut memacu investor global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi yang hanya akan menanamkan investasinya di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk dalam index tersebut.

Di Indonesia, kini kita menyaksikan perbincangan yang terus berlanjut seputar konsep dan perjalanan CSR ini. Ada persetujuan dan pula pertentangan. Terlebih pihak pemerintah secara khusus membuatkan UU tentang tanggung jawab sosial ini, yakni dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 74. Terlepas dari itu, isu tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) memang kian hangat. Persoalannya bukan hanya dari aspek sosial, tetapi sudah jauh merasuk ke aspek

bisnis dan penyehatan orporasi. Sehingga, CSR tidak lagi dipandang sebagai keterpaksaan, melainkan sebagai kebutuhan. Dari yang semula dianggap sebagai *cost*, kini mulai diposisikan sebagai investasi.

Dalam sebuah ulasan di Majalah Marketing (edisi 11/2007) menegaskan tentang mengapa pula perusahaan harus berinvestasi pada kegiatan CSR? Apakah lantaran moralitas semata atau dia sudah menjadi *marketing tools* yang efisien? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan manajemen dan divisi marketing sewaktu mempersiapkan strategi CSR. Akan tetapi, perdebatan paling baru tentang CSR adalah soal imbas program tersebut pada profit perusahaan. Para pelaku dituntut untuk ikut memikirkan program yang mampu mendukung *sustainability* perusahaan dan aktivitas CSR itu sendiri. Dalam hal ini, strategi perusahaan mesti responsif terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi bisnis, seperti perubahan global, tren baru di pasar, dan kebutuhan *stakeholders* yang belum terpenuhi

Berkaitan dengan masalah imbas tadi, *Global CSR Survey* paling tidak bisa memperlihatkan betapa pentingnya CSR. Dalam survei di 10 negara tersebut, mayoritas konsumen (72%) mengatakan sudah membeli produk dari suatu perusahaan serta merekomendasikan kepada yang lainnya sebagai respon terhadap CSR yang dilakukan perusahaan tersebut. Sebaliknya, sebanyak 61% dari mereka sudah memboikot produk dari perusahaan yang tidak punya tanggung jawab sosial. CSR kini bukan lagi sekadar program *charity* yang tak berbekas, melainkan telah menjadi pedoman untuk menciptakan profit dalam jangka panjang (*CSR for profit*).

Karena itu, hendaknya kegiatan sosial yang dijalankan harus berhubungan dengan kepentingan perusahaan dan harus mendukung *core business* perusahaan. Philip Kotler (2007), dalam buku *CSR: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, membeberkan beberapa alasan tentang perlunya perusahaan menggelar aktivitas itu. Disebutkannya, CSR bisa membangun *positioning* merek, mendongkrak penjualan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas karyawan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya tarik korporat di mata investor. Menurut Godo Tjahjono, *Chief Consulting Officer Prentis*, CSR memang punya beberapa manfaat yang bisa dikategorikan dalam empat aspek, yaitu: *license to operate*, sumber daya manusia, retensi, dan produktivitas karyawan. Dari sisi marketing, CSR juga bisa menjadi bagian dari *brand differentiation*. Kini kita menyaksikan dan mengharap gairah perusahaan-perusahaan raksasa dunia untuk menerapkan program kepedulian sosial. Semoga ini tak hanya jadi sekedar angin segar ditengah kekosongan isu saja, melainkan mampu menjadi virus baik yang menyebar cepat di Indonesia.

Istilah CSR di Indonesia semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam

mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak (*for better or worse*), bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham. Melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada *core bisnis* perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, PT Bumi Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai *stakeholders* dalam skala prioritasnya. Sementara itu, *stakeholders* dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para *customer*-nya.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga

kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

#### ***F. Kedermawanan Kapitalis***

Kapitalis dan kedermawanan sebenarnya dua sisi pada koin yang sama. Kedermawanan adalah limpahan kapitalis. Peran utama kedermawanan melegitimasi berlangsungnya sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang, sekaligus memberikan keuntungan ganda. Pertama, memberi wajah manusiawi pada sistem yang memungkinkan penguasaan kekayaan pada segelintir orang dengan cara “mengembalikan” sebagian darinya kepada kaum dhuafa. Kedua, memberi peluang para pelakunya, yakni para kapitalis dan filantropis, untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, karena perusahaan yang melakukan CSR dan penderma biasanya menikmati insentif dari pemerintah berupa pembebasan atau pengurangan pajak.

Kedermawanan merupakan konsekuensi diadopsinya kapitalisme sebagai ideologi dan praktek bernegara dan bermasyarakat. Penderma didefinisikan sebagai konseptualisasi praktek memberi, uang atau sumberdaya lain, termasuk waktu, baik kepada perorangan, suatu misi, atau organisasi derma, atas dasar rasa kecintaan kepada manusia. Sebagaimana maknanya itu, kedermawanan merupakan instrumen bagi para kapitalis untuk “mengembalikan” sebagian kecil

hasil praktek riba yang dijalankannya sebagai sedekah kepada kaum dhuafa yang sebenarnya adalah korban kapitalisme.

Yani (2007) menyebutkan, bagi kalangan aktivis pemantau korporasi, filantropi dan CSR bukanlah bentuk tindakan belaskasihan perusahaan kepada publik oleh karena kebaikan hati perusahaan, tetapi sebaliknya merupakan kondisi *sine qua non* yang tercipta karena sifat keberadaan perusahaan di tengah publik. Perusahaan dianggap berada di ranah publik dan keberadaannya dalam aktivitas bisnisehari-hari telah mempengaruhi secara luas dan mendalam kepentingan-kepentingan publik. Operasi bisnis transnasional telah mempengaruhi masyarakat secara global dengan banyak kasus yang timbul di seluruh dunia.

Lebih lanjut Yani (2007) menyimpulkan, tidak ada argumentasi yang kuat untuk memperlawankan antara filantropi dan kapitalisme. Justru keduanya saling membutuhkan satu sama lain agar masing-masing terus bisa hidup berdampingan. Seperti ditunjukkan oleh studi yang dilakukan Yani (2007), filantropi memerlukan kapital agar seseorang bisa berderma. Sebaliknya, kaum kapitalis perlu mengadakan filantropi untuk meyakinkan publik bahwa ia mempunyai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial. Namun sebetulnya tidak cukup memadai hanya melihat filantropi perusahaan dari tujuan praktisnya saja. Harus dilihat juga bahwa banyak kalangan usahawan yang memang memiliki sifat dermawan seperti ditunjukkan oleh industrialis otomotif Henry Ford (*Asia Pasific Philantropy Consortium*).

Harus diakui, kapitalisme memiliki wajah ganda. Di samping mendatangkan berbagai macam akibat buruk kepada miliaran umat manusia, para



kapitalis juga sadar betul bahwa tanpa tanggung jawab sosial maka keuntungan hanyalah ilusi yang lambat laun akan hilang dengansendirinya karena produk-produk mereka dijauhi oleh konsumen. Namun sebetulnya yang lebih mendasar adalah adanya kesadaran para kaum kapitalis bahwa mereka hidup di suatu dunia dimana orang-orang lain juga tinggal. Dunia yang satu ini oleh para fungsionalis disebut sebagai satu sistem yang saling kait-mengait satu sama lain. Paradoks filantropi dan kapitalisme, bagaimanapun mustahilnya dua gagasan ini seperti tampak dipermukaan, bukanlah praktik dan produk intelektual yang asal jadi begitu saja tanpa ada preseden (Yani, 2007). Sebegitu bertentangnya kapitalisme dan sosialisme pun dapat dipadukan menjadi suatu gagasan yang bisa dipraktikkan menjadi kenyataan. Anthony Giddens (1998) dalam bukunya yang berjudul *The Third Way*, telah menunjukkan dua ekstrim filsafat ini bisa menjadi satu tanpa saling menghancurkan satu sama lain.

#### ***G. Kedermawanan Kapitalis dalam Bingkai CSR***

CSR merupakan gejala hubungan bisnis-negara-masyarakat yang secara sadar serta sistematis baru diperhatikan menjelang dekade 1990-an. Di satu sisi momen konseptualisasi itu dibangun dari dalam lingkungan dunia akademik, di sisi lain, dunia menyaksikan akselerasi program ekonomi politik kapitalisme neoliberal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Program ekonomi-politik yang tidak hanya melancarkan agenda penataan ekonomi, politik, sosial, dan budaya namun juga sebagai suatu program filosofis yang berkehendak menyutikan kompleksitas kehidupan manusia ke dalam satu aspirasi: manusia pada dasarnya hanyalah makhluk ekonomi (*homoeconomicus*). Meski manusia

juga merupakan *zoonpoliticon* (makhluk politik), *homofaber* (makhluk yang mencipta dengan bekerja), *homosocius* (makhluk yang berkawan), dan sebagainya namun logika kerangka pikir neoliberalisme akan menginterogasi seluruh dimensi itu dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa semua itu mengabdikan pada insting dasar manusia yaitu memuaskan kepentingannya sendiri (Yani, 2007). Dalam periode kapitalisme neoliberal, pemuasan hasrat itu adalah dengan menumpuk laba atau akumulasi kapital.

Beranjak dari konteks kapitalis neoliberal di atas maka kita dapat memahami bahwa pada umumnya pengertian CSR akan merujuk dan menunjuk pada suatu tindak kebaikan hati si kapitalis dalam mengucurkan sebagian keuntungan bisnisnya (*trickle down effect*). Kapitalisme telah mengalami perubahan watak karena mereka telah banyak belajar dari berbagai kritikan. Demi menjaga kepentingan jangka panjang, kapitalisme dengan cerdas mengakomodasi tuntutan masyarakat, serikat pekerja, keberlanjutan kehidupan dan daya kritis konsumen. Dari sinilah kemudian lahir wajah baru kapitalisme dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (kompasiana.com).

Meskipun terkesan nampak mulia namun sebenarnya CSR berakar dalam sistem produksi kapitalis, yang motif utamanya adalah maksimalisasi keuntungan. CSR merupakan salah satu upaya untuk membenarkan terus berjalannya proses akumulasi modal selama ini sebagai hal yang seolah alamiah bagi setiap manusia. Sementara pada saat yang sama, konsep itu terus mengabaikan relasi-relasi kekuasaan kongkrit yang mempertahankan produksi dan reproduksi sistem

kapitalisme ini. Maka dari itu tidaklah mengherankan jika diskusi-diskusi tentang CSR tetap tidak menyentuh dan tetap bungkam terhadap berbagai keganasan pada kelas pekerja di bawah kebijakan fleksibilisasi pasar tenaga kerja (*labour market flexibilisation*).

Sejarah CSR dimulai sejak Robert Owen mulai prihatin atas munculnya berbagai patologi sosial (Bichta, 2003) yang mengiringi bangkitnya Revolusi Industri di abad 19 (Fluitman, 2002). Sejak saat itu konsep tanggung jawab sosial telah dan terus dikembangkan dalam bentuk konseptualisasi yang makin kompleks dan canggih. Secara umum konsep tersebut menggambarkan serangkaian perilaku korporat ketika bertemu dan berhadapan dengan apa yang dipandang sebagai dampak sosial operasi perusahaan (Fulcher, 2004). Artinya, suatu perilaku korporat seharusnya tidak hanya mengembalikan sisa hasil usaha kepada para pemegang sahamnya, upah bagi buruh-buruhnya, produk dan jasa-jasa bagi para konsumennya. Korporat bisnis juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan ekologis dari berbagai aktivitasnya. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep CSR telah tumbuh berkembang dalam berbagai rupa teks tentang etika bisnis, CSR, dan unjuk diri sosial perusahaan (*corporate social performance*) (Garriga, 2004).

Sejak dekade 1990-an, beberapa frasa kalimat yang indah ditemukan seiring pengembangan konsep CSR seperti '*corporate citizenship*', '*corporate sustainability*', and '*triple bottom line*' (Jones, 1996). "*Corporate citizenship*" bermaksud menjelaskan tentang pentingnya pelibatan diri perusahaan secara lebih luas dengan para pemangku kepentingannya (*stakeholders*) dibandingkan dengan

para pemegang saham (*shareholders*). “*Corporate sustainability*” mengacu pada pertimbangan bahwa segala perilaku korporat haruslah sesuai dengan gagasan pembangunan yang berkelanjutan. Dan, “*triple bottom line*” menekankan pentingnya para pelaku bisnis dalam mendorong terwujudnya keseimbangan dan kesetaraan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang menunjang kepentingan bisnis itu sendiri.

Konsep-konsep turunan itu pada prakteknya mencakup hal-hal yang sangat luas. Konsep-konsep itu menjadi instrumen pemandu arah bagi beragam aktivitas belas kasih (*charity*) mulai dari mendukung niat baik para individu relawan dan mendorong tumbuhnya investasi sosial dalam proyek-proyek komunitas, seperti program Air Bersih Aqua Danone dan Bea Siswa Sampoerna; pembukaan kesempatan mengisi lapangan kerja seperti pelatihan-pelatihan kerajinan limbah plastik ibu-ibu rumah tangga oleh Unilever; pelatihan di bidang lingkungan hidup; hingga pengelolaan masalah-masalah hak asasi manusia yang muncul dari aktivitas bisnis seperti pembiayaan seminar akademik tentang masyarakat adat oleh PT Freeport Indonesia ([kompasiana.com](http://kompasiana.com)).

Ketika mendefinisikan hubungan antara dunia bisnis dengan masyarakat, penjelasan CSR yang demikian jatuh ke dalam cara penjelasan fungsionalis. Penjelasan dimana CSR dipandang sebagai upaya suatu perusahaan menjalankan fungsinya yang dibutuhkan bagi keberlanjutan hidup dan stabilitas masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Seolah tanpa berjalannya CSR, masyarakat tidak akan bertahan. Masalahnya: perspektif fungsionalis itu mengaburkan rasionalitas paling mendasar dalam dunia bisnis saat ini atau *raison d’etre*-nya yaitu akumulasi

modal. Hanya saja, memasukkan rasionalitas itu ke dalam analisis CSR tentu menjadi beban berat para pebisnis maupun ahli CSR perusahaan karena artinya sebangun dengan menihilkan CSR itu sendiri.

Dengan demikian, suatu penilaian kritis terhadap konsep CSR seharusnya juga dimulai dari awal mula dan bagaimana posisi kekuasaan bisnis di dalam suatu masyarakat. Kekuasaan bisnis atau korporat utamanya datang dari akumulasi kekayaan melalui aktivitas-aktivitas perdagangan. Makin banyak keuntungan dan kekayaan yang diperoleh, makin berkuasalah korporat itu. Dengan begitu menjadi jelas bahwa pengejaran keuntungan merupakan inti keras dari seluruh aktivitas perdagangan sekaligus merupakan prinsip pertama dalam berbisnis yang dilakukan entah melalui (a) penghindaran atau meniadakan kompetisi (misalnya lewat segmentasi pasar, monopoli atau kartel), (b) memaksimalkan produktivitas organisasional (misalnya lewat mekanisme subkontrak, outsourcing, unbundled), dan (c) pembiasaan biaya-biaya produksi yang ditimbulkan dari pemberlakuan prinsip di atas (misalnya menurunkan tingkat upah) (Greenwood, *et al.*, 2009). Meski demikian, masalahnya bukankah apakah keuntungan itu haram atau halal. Masalahnya bukan karena keuntungan selalu menjadi motif penting orang melakukan bisnis melainkan adalah bahwa dalam dua abad terakhir pengejaran keuntungan menjadi makin terlembagakan di seluruh aktivitas manusia modern. Manusia menjadi makin terciutkan menjadi mesin hasrat pengejar keuntungan belaka.

Ada banyak contoh kasus dalam beragam kajian tentang operasi perusahaan di era kapitalisme yang memperlihatkan bagaimana penyerapan

elemen tenaga kerja dari masyarakat selalu diiringi dengan penghancuran struktur sosial. Misalnya, Karl Polanyi dalam bukunya *The Great Transformation* (1944) mengingatkan bahwa kapitalis selalu kreatif menciptakan kemampuan dalam menghancurkan (*creative destruction*) struktur sosial kehidupan manusia. Ia mengajak kita untuk mengantisipasi kekuatan destruktif dari pasar yang bebas mengatur dirinya sendiri (*self-regulating market*). Polanyi melihat bahwa sebenarnya tenaga kerja melekat erat di dalam suatu rangkaian hubungan sosial manusia di sepanjang abad sementara pada saat yang sama kapitalisme tingkat lanjut (*advanced capitalism*) dan proses komodifikasi tenaga kerja justru menceraabutnya dari pasar tenaga kerja dengan terus menciptakan kesenjangan-kesenjangan melalui mekanisme tingkat upah.

Lembaga-lembaga kapitalis tentu saja dapat membantu menjamin alokasi optimal sumber daya tenaga kerja misalnya dengan menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru. Tetapi penciptaan jenis pekerjaan baru tentu dipandang akan mengancam eksistensi reproduksi masyarakat kapitalis secara keseluruhan. Karena tanpa reproduksi kesenjangan dalam masyarakat maka eksistensi pasar tenaga kerja kapitalis tidak mungkin ada. Maka dari itu studi-studi CSR yang dilakukan dengan menyertakan relasi dan posisi kekuasaan bisnis dalam masyarakat akan membawa apa yang mengawang di angkasa kembali ke bumi lewat cara mengelaborasi etika bisnis sambil menelanjinginya dihadapan realitas yang seringkali disembunyikan dari publik rakyat pekerja secara keseluruhan.

Pada titik itu konsep CSR jelas terlalu terbatas untuk digunakan memandang persoalan yang telah disebut di atas. Berbagai definisi CSR terus

menerus ditantang oleh keharusan imperatif kompetisi ekonomi pasar hari ini yaitu menghasilkan keuntungan. Maka alih-alih menyelesaikan masalah-masalah sosial yang diciptakan di sepanjang proses akumulasi kekayaan, konsep tanggung jawab sosial justru malah mengarahkan diri dengan mengaitkannya pada donasi-donasi belas kasihan (*charitable donations*). Dalam banyak kasus donasi itu hanya mencakup jumlah penerima yang sedikit lewat kucuran keuntungan yang sedikit pula (Wood, 1991). Hal itu memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial lebih mirip seperti “perban yang hanya menutupi sebagian permukaan kedalaman luka yang dibuat oleh kapitalis” (Jones, 1996). Atau paling tidak, CSR hanyalah sebuah nama yang diberikan kepada suatu program alokasi sumber daya atau *social transfer* yang bermaksud meredam tuntutan-tuntutan sosial sejauh mereka tidak merecoki tujuan pengejaran keuntungan si kapitalis.

Tidak hanya terbatas, namun konsep CSR juga bersifat mengecoh. CSR sering digambarkan sebagai upaya korporat melayani kepentingan umum, padahal kenyataannya yang dilayani adalah kepentingan modal. Sama mengecohnya ketika sebenarnya konsep itu adalah ideologi yang berfungsi melayani legitimasi kepentingan kelompok *status quo* di dalam masyarakat lewat jalan mempertahankan gambaran hubungan bisnis-masyarakat yang harmonis. Konsep itu hendak memberikan gambaran wajah kapitalisme yang beradab sehingga dianggap tidak memerlukan lagi kekuatan pengontrol lain untuk menjaga agar tetap akuntabel bagi masyarakat. Inilah yang diyakini oleh kawanan para manajer perusahaan lulusan sekolah-sekolah bisnis terkemuka yang tidak akan pernah memahami tuntutan para buruh di pabrik-pabrik.

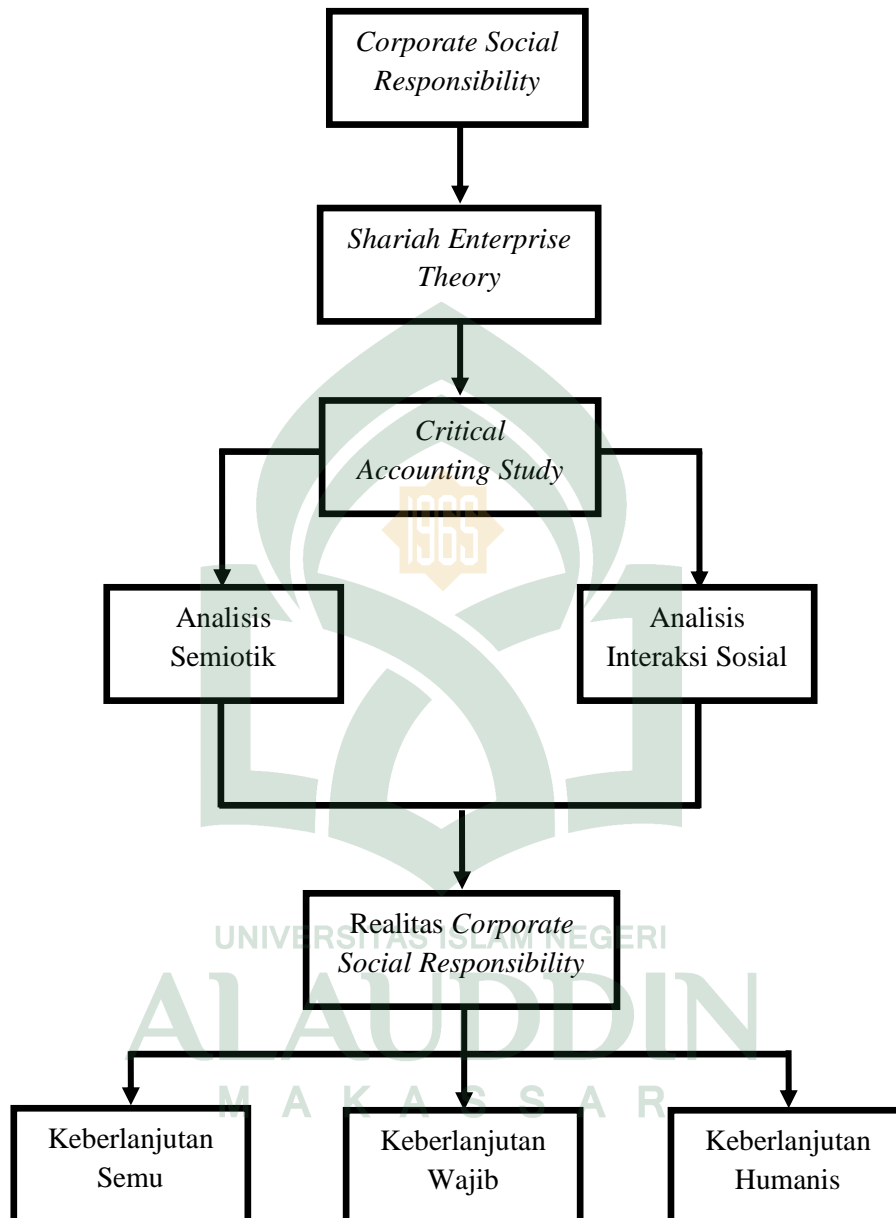
Bahkan sesungguhnya kawanan para manajer itu tidak pernah bertemu tatap muka memahami gurat wajah penderitaan dan keluh kesah para buruh-buruhnya karena hirarki produksi industri dan sistem alih-daya (*outsourcing*) makin menciptakan jarak spasial ruang dan jarak moral antara manajemen dan buruh. Ada empat implikasi CSR ketika konsep itu menganggap buruh sebagai *stakeholders* (Greenwood, *et al.*, 2009), yaitu pertama, konsep itu menyeragamkan dan menyatukan kepentingan buruh yang berbeda dengan pemilik modal dan manajer. Seolah-olah kepentingan kedua unsur itu sama. Kedua, CSR berupaya mengkonstruksikan buruh agar hidup sesuai dengan peran hubungan industrialnya. Ketiga, menggoyahkan stabilitas lapangan kerja karena buruh yang tidak sesuai dengan gambaran harmonis hubungan industrial akan di PHK, terlempar dari lapangan kerja. Keempat, konsep itu mengorbankan martabat dan hak-hak individual buruh sebagai pihak yang dikasihani. Maka dari itu memberi cap buruh sebagai *stakeholders* nampak lebih ditujukan untuk melayani kepentingan organisasi produksi kapitalisme dibandingkan kepentingan buruh itu sendiri. Dari empat implikasi di atas, pengabaian tersebut lekat terefleksikan di dalam berbagai tubuh literatur CSR. Jadi alih-alih mengkonseptualisasikan CSR dalam konteks ekonomi-politik kapitalisme, kita akan menemukan banyak studi tentang CSR yang didominasi oleh diskusi-diskusi yang berorientasi pada pentingnya membangun etika perusahaan atau studi-studi empiris yang mengaitkan perilaku tanggung jawab sosial dengan pencapaian-pencapaian prestasi ekonomi (*economic performance*) perusahaan.



#### ***H. Kerangka Konseptual***

Kerangka pemikiran yang dikembangkan, didasarkan pada fenomena CSR sebagai usaha dalam pencitraan perusahaan melalui bentuk kedermawanan dan dipandang dari segi *Shari'ah Enterprise Theory*. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Disamping itu yang diharapkan dari perusahaan adalah meningkatkan efektifitas kegiatan yang tanggung jawab sosial perusahaan melalui kegiatan-kegiatan yang terintegrasi, fokus berdampak luas, dan berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pemangku kepentingan secara keseluruhan. Hal ini dikorelasikan dengan mengimplementasikan CSR perusahaan dapat memperoleh citra yang positif dari masyarakat luas, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*), perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusianya (*human resources*) yang berkualitas (Wibison, 2007:42). Dari keseluruhan penjelasan kerangka di atas menghendaki realitas konkrit berupa kedermawanan kapitalis.

*Gambar 2.1 Kerangka Konseptual*



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Indrianto dan Supomo (2013: 12) merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data pada kantor Pusat Informasi Pasar Modal (IDX) yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi No. 124 Makassar. Selain itu, pengambilan data juga dilakukan dengan mengakses situs resmi perusahaan yang akan diteliti, dan dengan mengunduh (*download*) melalui internet data-data lain yang terkait penelitian.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Al-Quran dalam melihat fenomena praktik CSR dan *critical paradigm* khususnya paradigma *Radical Humanis*. Chariri (2009: 8) menjelaskan bahwa paradigma ini berusaha mengkritisi dan menjelaskan mengapa (*why*) realitas sosial dibentuk dan menanyakan alasan atau kepentingan apa yang melatarbelakangi pembentukan realitas sosial tersebut. Dipilihnya paradigma *critical* dalam akuntansi menurut Sawarjuwono (2005: 89) adalah karena mempunyai tujuan ganda, yaitu memahami suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri. Umumnya, teori yang sering digunakan untuk menganalisis praktik

*sustainability* adalah *legitimacy theory*. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak mengacu pada *legitimacy theory* dengan alasan sebagaimana yang diungkapkan Dewi, dkk (2011: 6) bahwa penggunaan *legitimacy theory* dalam penelitian akuntansi, akan lebih merefleksikan peran manusia sebagai makhluk individu yang memiliki sifat egois (*self interest*) sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai kapitalistik dan cenderung melupakan peran manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat altruistik (*collective interest*).

### **C. Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yang menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 146) adalah jenis data penelitian yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menurut Indriantoro dan Supomo (2013: 147) adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data-data sekunder dalam penelitian ini berupa *sustainability report*, dan data-data atau dokumen pendukung lainnya berupa pedoman *sustainability reporting* dari GRI, berita di media terkait aktivitas perusahaan, dan data-data lainnya yang relevan.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Studi Dokumentasi**

Yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial perusahaan yaitu *sustainability report*

yang mengandung *narrative text*, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai praktik *sustainability reporting* perusahaan.

## 2. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

## 3. Internet Searching

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari *internet* guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti.

### **E. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengunduh (*download*) data yang dibutuhkan berupa *sustainability report*, dan data-data pendukung lainnya berupa panduan pelaporan *sustainability report* dari GRI dan berita dari media terkait aktivitas perusahaan dan data-data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan paradigma kritis dalam melihat fenomena akuntansi atau *critical accounting study* dengan menggunakan analisis semiotik untuk memahami makna yang terkandung dari bahasa tertuang dalam *sustainability report* lalu kemudian menganalisisnya dengan perspektif *shariah enterprise theory*, sehingga realitas “*sustainability*”

yang terefleksi dalam praktik *sustainability reporting* dapat dilihat secara lebih holistik (menyeluruh). Menurut *shariah enterprise theory*, interaksi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya, tidaklah hanya terbatas pada konsep *system mechanism* saja, melainkan juga termasuk dalam konsep *lifeworld* dan konsep berketuhanan.

Secara sistematis, metode pengolahan dan analisis data ini mengacu pada metode yang digagas oleh Sawarjuwono (2005: 100) dengan melakukan modifikasi mengikuti metode Dewi, dkk (2011: 10-11). Adapun gambaran penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *The Quasi of Ignorance Stage*, yang merupakan tahap persiapan dan penelusuran awal penelitian itu sendiri. Tahap ini menggambarkan *background* historis, pengalaman dan pengetahuan penulis yang dilakukan dengan *literature review* dan studi dokumentasi. Tahap ini juga berupaya untuk mereduksi data dengan membaca berulang-ulang lalu memahami data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang relevan dengan penelitian, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi
2. *The Formation and Extension of Critical Theoremas Stage*, yang merupakan tahap memahami dan memperoleh pengetahuan tentang objek studi melalui proses eksaminasi yang mendalam dan interpretasi dokumen sosial.

Dewi, dkk (2011: 14) menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan yang tertera dalam dokumen-dokumen sosial, baik yang berupa laporan tahunan maupun *sustainability report* peneliti akan melakukan eksaminasi secara mendalam. Eksaminasi dokumen dalam penelitian ini dilakukan melalui perspektif paradigma bahasa Habermas yaitu dengan cara menginterpretasikan bahasa yang ada pada *sustainability report* setiap perusahaan. Interpretasi bahasa juga dilakukan dengan analisis semiotik yang menggunakan struktur kalimat sebagai dasar untuk menjelaskan suatu *narrative text* pada *sustainability report* (Chariri dan Nugroho, 2009: 6). Dewi, dkk (2011: 14) menjelaskan bahwa melalui interpretasi bahasa, maka realitas eksternal objektif yang konkrit untuk kondisi sosial dan historikal pada waktu dan tempat yang berbeda dapat direpresentasikan. Melalui bahasa pula dapat diketahui bagaimana ketidakadilan akan terungkap dan bagaimana cara manusia mengatasi berbagai macam permasalahan.

3. *The Consiousment and Enlightenment Stage*, yaitu tahap penyadaran dan pencerahan. Dalam pengajuan ini peneliti harus mampu membuktikan bahwa dalam teorinya terdapat sesuatu yang akan membawa dampak ke arah kebaikan keadaan.

Interaksi sosial antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya dalam praktik *sustainability reporting* seharusnya terbebas dari *system mechanism* sebagaimana yang selama ini dipahami dalam bingkai *legitimacy theory*. Dalam konsep *system mechanism*, praktik *sustainability*

*reporting* yang dilakukan perusahaan dipandang dapat dipengaruhi oleh *steering media* baik *media money* (pertimbangan ekonomis) maupun *media power* (peraturan dan hukum). Seharusnya interaksi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya menurut pandangan paradigma kritis, khususnya *radical humanism*, tidaklah hanya terbatas pada konsep *system mechanism* saja, namun juga termasuk dalam konsep *lifeworld*. Jika ditinjau dari konsep *lifeworld*, praktik *sustainability reporting* yang dilakukan perusahaan adalah melebihi pertimbangan ekonomis (*media money*), maupun ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan (*media power*). Sejalan dengan yang diungkapkan Dewi, dkk (2011: 11-12) di atas, penelitian ini tidak hanya akan berhenti pada tahap memperoleh pemahaman mengenai objek studi. Peneliti juga berkesempatan untuk mengajukan ide penyadaran dan pencerahan yang bercermin pada konsep etika dan moralitas dengan berlandaskan pada hati nurani sebagai upaya menemukan kebenaran sejati. Berdasarkan konsep ini, maka perusahaan yang menjadi objek studi diharapkan dapat mencapai keberhasilan yang hakiki.

4. *The Selection of Appropriate Strategies Stage*, merupakan tahap penarikan kesimpulan, evaluasi dan verifikasi melalui proses sintesa pemahaman makna atas realitas '*sustainability*'. Pada tahap ini, peneliti akan merumuskan tindakan/strategi yang akan diambil dalam upayanya melakukan perbaikan keadaan.



### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*. Namun karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin dalam Rahardjo (2010) adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut Denkin dalam Rahardjo (2010), triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data utama yaitu *sustainability report*, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti panduan pelaporan *sustainability report* dari GRI, dan berita-berita terkait aktivitas perusahaan di berbagai media.. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini *semiotic theory* dan *the theory of communicative action* Habermas untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Perusahaan***

##### **1. *Gambaran Umum PT Bumi Asam (Persero) Tbk.***

PT Bukit Asam (Persero) Tbk. atau yang lebih dikenal dengan PT BA, didirikan pada 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980, dengan kantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Bukit Asam saat ini memiliki dua pelabuhan yaitu: pelabuhan batu bara Tarahan di Bandar Lampung dan pelabuhan batu bara Kertapati di Palembang. Kegiatan penambangan sebenarnya sudah dimulai sejak 1919 oleh pemerintah Belanda. Tahun 1942 pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah Jepang dan setelah Indonesia merdeka pada 1945 kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini.

Selama dikelola Pemerintah Indonesia, Perusahaan Tambang Batu bara ini beberapa kali berganti nama. Pertama bernama Perusahaan Arang Tambang Bukit Asam (PN.TABA). Tahun 1959-1960, pengelolaan tambang batu bara Bukit Asam dilakukan oleh Biro Urusan Perusahaan-Perusahaan Tambang Negara (BUPTAN) dan berubah menjadi Badan Perusahaan Umum (BPU) yang membawahi tiga Perusahaan Negara yaitu:

- 1) PN. Tambang Batu Bara Ombilin di Sumatera Barat.
- 2) PN. Tambang Arang Bukit Asam di Tanjung Enim.
- 3) PN. Tambang Batu Bara Mahakam di Kalimantan Timur.

Seiring berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1968, badan Perusahaan Umum (BPU) batu bara beserta tiga Perusahaan Negara (PN) tambang batu bara tersebut digabung menjadi unit produksi Bukit Asam, dan berubah status menjadi Perum Tambang Batu bara. Perubahan status PT Bukit Asam menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk.) dimulai sejak tahun 2002, yakni semenjak PT Bukit Asam (Persero) Tbk., menjual sebagian sahamnya di lantai bursa.

### **Visi dan Misi PT Bukit Asam (Persero) Tbk.**

Visi PT Bukit Asam (Persero) Tbk adalah untuk **“Menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, PT Bukit Asam (Persero) Tbk memiliki misi mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi *stakeholders* dan lingkungan.

Makna yang terkandung dalam visi dan misi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, yaitu **“Mempersembahkan sumber energi untuk kehidupan dunia dan bumi yang lebih baik”**, dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah visioner, integritas, inovatif, profesional, dan sadar biaya dan lingkungan

## **2. Gambaran Umum PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.**

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau lebih dikenal dengan sebutan PGN atau PGAS, merupakan perusahaan BUMN yang didirikan untuk mendistribusikan gas dari daerah-daerah penghasil gas, yakni sumur-sumur gas dikawasan eksploitasi minyak dan gas, ke daerah industri pengguna, maupun kawasan pemukiman. Keberadaan PGN berawal dari perusahaan gas swasta Belanda: L.J.N. Eindhoven & Co yang berdiri tahun 1859 dan pada mulanya

memperkenalkan penggunaan gas kota dari batubara di Indonesia. Pada tahun 1958 perusahaan tersebut dinasionalisasi dan diubah menjadi Perusahaan Negara Gas (PN Gas).

PGN telah berdiri sejak tahun 1859, dengan kegiatan utama pendistribusian gas ke kawasan pemukiman. Seiring dengan perkembangan jaman, PGN kini mendistribusikan gas dengan bidang kegiatan utama sebagai Distributor Gas dan sebagai Transporter Gas. Daerah operasional Perseroan kini melingkupi hampir seluruh kawasan Barat Indonesia, mulai Sumatera dan Jawa. Daerah operasional PGN dalam waktu dekat akan melingkupi seluruh kawasan Indonesia.

Saham Perseroan diperdagangkan di pasar saham Bursa Efek Indonesia, mulai 5 Desember 2003, dengan nama perdagangan PGAS. Harga saham PGN di BEI pada tanggal 30 Desember 2015 berada pada posisi Rp2.745 per lembar, dengan nilai kapitalisasi pasar saham PGN adalah sebesar Rp66,54 triliun. Pada tanggal 30 Desember 2015, saham PGN dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebesar 57% dan publik sebesar 43%.

#### **Visi dan Misi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. :**

Visi :

Menjadikan perusahaan kelas dunia dalam pemanfaatan gas bumi.

Misi:

Meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi stakeholders melalui:

- a. Penguatan bisnis inti di bidang transportasi, niaga gas bumi dan pengembangannya.

- b. Pengembangan usaha pengolahan gas.
- c. Pengembangan usaha jasa operasi, pemeliharaan dan keteknikan yang berkaitan dengan industri gas.
- d. Profitisasi sumber daya dan aset perusahaan dengan mengembangkan usaha lainnya.

### **3. Gambaran Umum PT Freeport Indonesia**

Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan Indonesia yang berafiliasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Freeport Indonesia mengeksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia beroperasi di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport Indonesia berkantor pusat di Jakarta. PT Freeport Indonesia memasarkan berbagai konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seantero dunia.

Kompleks pertambangan Grasberg PT Freeport Indonesia merupakan salah satu penghasil tembaga dan emas tunggal terbesar dunia, sekaligus mengandung sejumlah cadangan tembaga tambang ulang terbesar dan cadangan emas tunggal terbesar dunia. Grasberg merupakan jantung dari daerah mineral yang berprospek tinggi tempat eksplorasi yang terus berjalan memberikan kesempatan berlanjut bagi cadangan-cadangan PT Freeport Indonesia yang berumur panjang.

*Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX)* merupakan sebuah perusahaan pertambangan internasional terkemuka dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, U.S.A. FCX mengoperasikan aset-aset besar, berumur panjang,

dan yang secara geografis beragam di empat benua, dengan cadangancadangan tembaga, emas, dan molibdenum yang jelas ada dan berpotensi. Dari pegunungan khatulistiwa Papua, Indonesia, gurun Barat Daya Amerika Serikat, pegunungan berapi yang agung Peru, wilayah-wilayah penghasil tembaga tradisional Chile, sampai berbagai kesempatan menggembirakan yang muncul di Republik Demokratis Kongo, PT Freeport berada di garis depan dalam penyediaan berbagai logam yang esensial bagi dunia.

FCX merupakan perusahaan perdagangan umum tembaga terbesar dunia, produsen molybdenum-suatu logam yang digunakan dalam berbagai logam campuran baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi bahan pelumas terkemuka dunia, dan salah satu penghasil besar emas. Sebagai salah satu pemimpin industri, PT Freeport Indonesia menunjukkan keahlian yang terbukti, baik menyangkut teknologi maupun metode produksi untuk menghasilkan tembaga, emas, dan molibdenum.

Aset FCX termasuk wilayah tambang Grasberg, tambang tembaga dan emas terbesar di dunia dalam hal cadangan yang dapat dipulihkan; operasi pertambangan yang signifikan di Amerika, termasuk tambang mineral skala besar di Morenci dan Safford, Amerika Utara dan wilayah operasi Verde Cerro dan El Abra di Amerika Selatan; dan tambang mineral Fungurume Tenke di Republik Demokratik Kongo. Informasi tambahan tentang FCX tersedia di situs FCX di [www.fcx.com](http://www.fcx.com).

PT Freeport Indonesia sedang mengembangkan beberapa proyek kapital di wilayah pertambangan Grasberg, meliputi pembangunan jalur penambangan

bawah tanah berskala besar dan tingkat tinggi yang terletak di bawah dan bersebelahan dengan tambang terbuka Grasberg. Proyek lain juga berlangsung yaitu pengembangan lanjutan infrastruktur umum, Grasberg Block Cave dan tambang bawah tanah, *Deep Mill Level Zone [underground mine]*.

### **Visi dan Misi PT Freeport Indonesia :**

Visi :

Menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa.

Misi :

Berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktik-praktik pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentramankaryawan dan masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

### **B. Pengungkapan Aspek Ekonomi Perusahaan**

Cukup banyak data makro ekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat di manfaatkan perusahaan. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat di jadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis ,misalnya: PDB, investasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran



pemerintah, penganggaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang (wikipedia).

#### **1. Pengungkapan Aspek Ekonomi PT Bumi Asam (Persero) Tbk.**

Sejak tahun 2007, PTBA telah menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang diterbitkan setiap tahun. Laporan tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi sarana penilaian kinerja perusahaan oleh publik. Aspek ekonomi merupakan aspek yang penting dan tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan PTBA, sebagaimana yang diungkapkan dalam *sustainability report* PTBA tahun 2014 :

*“PTBA telah mengidentifikasi dengan seksama kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama, berdasarkan pengaruh dominan kelompok-kelompok tersebut terhadap keberlangsungan usaha Perseroan, atau sebaliknya, di bidang ekonomi, sosial, atau lingkungan.” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 118).*

Dalam menjalankan aktivitas PTBA terkait aspek ekonomi, PTBA tidak hanya mempertimbangkan manfaat untuk keuntungan perusahaan semata, namun juga dengan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti dalam hal produksi yang tercantum dalam *sustainability report* PTBA :

*“Selama 2014, PTBA sebagai mitra usaha masyarakat telah menggunakan produk dan jasa masyarakat yang merupakan Mitra Binaan PTBA, yaitu jasaboga, pembelian suku cadang dan manufaktur. G4-EC9” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 137).*

Hal yang sama juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur di masyarakat. PTBA menganggap penyediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat lokal.

*“...Kegiatan ekonomi di daerah juga tumbuh oleh investasi yang dilakukan Perseroan di daerah-daerah operasi, termasuk untuk keperluan infrastruktur, perumahan karyawan, Rumah Sakit PTBA, dan fasilitas sosial dan umum bagi karyawan PTBA. G4-EC8”. (Sustainability Report tahun 2015 halaman 52).*

Selain manfaat untuk perusahaan dan masyarakat sekitar, PTBA juga berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, diantaranya dengan pembayaran royalti dan pajak.

*“Sejalan dengan kenaikan laba, maka Beban Pajak Penghasilan (bersih) yang dibayarkan oleh Perseroan juga meningkat, Pada 2015, PTBA membayar pajak sebesar Rp626,685 miliar atau naik 14% apabila dibandingkan dengan tahun 2014, yang tercatat sebesar Rp550.171 miliar, Adapun pembayaran royalti pada tercatat tahun 2015 sebesar Rp810,82 miliar naik 6% dibanding tahun 2014 sebesar Rp765,42 miliar.”. (Sustainability Report tahun 2015 halaman 52).*

Dalam aspek ekonomi, dapat dilihat bahwa PTBA telah melakukan berbagai upaya yang sistematis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara umum, PTBA telah melaporkan secara maksimal aspek ekonomi seperti yang disyaratkan oleh GRI. Hal tersebut dapat dilihat pada *sustainability report* PTBA pada tahun 2014 dan 2015 yang mengungkapkan 9 indikator ekonomi secara penuh sebagaimana yang disyaratkan oleh GRI.

## 2. Pengungkapan Aspek Ekonomi PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

### Tbk.

Kondisi perekonomian global yang membaik mengakibatkan meningkatnya permintaan gas bumi dari para pelanggan. Hal ini tentunya akan berdampak pada tingginya kinerja ekonomi perusahaan seperti yang diungkapkan pada *sustainability report* PGN :

*“The national economy is expected to return to positive growth in 2014. This will cause a rising demand for natural gas, which will impact on PGN’s revenue and increase the volume of gas passing through PGN’s transmission and distribution pipeline network.” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 71).*

*“PGN has been consistently and continually developed in parallel with the development and economic progress of Indonesia. PGN has also contributed in improving the people’s income and stakeholders’ economic value.” (Sustainability Report tahun 2015 halaman 73).*

Tujuan pengungkapan aspek ekonomi dalam *sustainability report* yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kinerja perekonomian yang dicapai oleh perusahaan selama aktivitas dalam periode pelaporan, sebagaimana terungkap dalam *sustainability report* PGN :

*“We ensure that PGN’s growth contributes to increased revenue and economic value for stakeholders who help drive the economy and national development.” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 69).*

Peningkatan kinerja ekonomi perusahaan memberikan dampak pada kontribusi terhadap negara berupa pajak dan dividen dengan jumlah yang ditetapkan melalui RUPS dan juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, pada tahun 2014 dan 2015 PGN telah melaporkan secara maksimal aspek ekonomi seperti yang disyaratkan oleh GRI. Namun pada tahun 2014 dan 2015, PGN tidak mengungkapkan secara penuh indikator ekonomi seperti yang disyaratkan oleh GRI. Hal tersebut dapat dilihat dalam *sustainability report* PGN tahun 2014 dan 2015 yang mengungkapkan hanya 5 indikator ekonomi dari 9 indikator yang ditetapkan oleh GRI.

### **3. Pengungkapan Aspek Ekonomi PT Freeport Indonesia Tbk.**

Pengungkapan aspek ekonomi perusahaan dilakukan untuk memberikan informasi terkait manfaat ekonomi yang diberikan oleh perusahaan kepada berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat dan Daerah serta bagi masyarakat lokal Papua.

*“Pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pemerintah negara tuan rumah melalui pajak, royalti dan kewajiban lain merupakan kontribusi signifikan bagi pembangunan negara dan daerah. Kami memiliki keyakinan bahwa peningkatan transparansi terhadap pendapatan dan pembayaran terkait sumber daya alam mendorong tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pembagian pendapatan dari sumber daya alam. Selain komitmen kami terhadap EITI di setiap negara, kami menjalankan praktik melaporkan pembayaran tunai setiap tahun kepada pemerintah, termasuk pembayaran kepada daerah, di semua negara dimana kami menyelenggarakan bisnis, sebagaimana tercantum di bawah.” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 19).*

*“We make concerted efforts to hire locally, as this practice incorporates local cultures and knowledge into our business systems and helps fulfill our commitment to supporting local economic development both directly and indirectly...” (Sustainability Report tahun 2015 halaman 13).*

Dalam aktivitas operasinya, PT Freeport juga memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui program pengembangan kewirausahaan masyarakat setempat sebagaimana yang diungkapkan dalam *sustainability report* berikut :

*“Kami melakukan kegiatan di berbagai belahan dunia yang tidak memiliki ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak, dimana penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran tentang kesehatan, yang sangat rendah dan sulitnya akses terhadap layanan kesehatan. Malaria, HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang menjangkiti masyarakat di sekitar kegiatan kami di Indonesia dan RDK, termasuk tenaga kerja kami. Melalui kerja sama dengan pemerintah setempat dan organisasi non pemerintah/LSM, Perusahaan kami secara khusus menyediakan sumber daya untuk membantu masyarakat dan pemerintah mengurangi resiko terhadap kesehatan masyarakat”. (Sustainability Report tahun 2014 halaman 25).*

*“PTFI melaksanakan sejumlah program pencegahan, penyuluhan, dan pengobatan HIV/AIDS untuk karyawan dan masyarakat sekitar. Pada tahun 2014, PTFI melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan tentang HIV/AIDS dengan jangkauan lebih dari 14.000 anggota masyarakat dan 9.100 karyawan, membagikan alat kontrasepsi berupa kondom, serta mengadakan lebih dari 700 sesi konseling tatap muka bersama pekerja seks komersial.” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 26).*

Dalam aspek ekonomi, dapat dilihat berbagai upaya telah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Mimika.

### **C. Pengungkapan Aspek Sosial Perusahaan**

Istilah *Corporate Social Responsibility* semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan *Corporate Sosial Activity* atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai program *Corporate Social Responsibility*, secara aktual aksinya

mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Ini sejalan dengan Waldman (2009) yang menyatakan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak *for better of worse*, bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya untuk masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Dengan mendasarkan motif *self presentation* dalam *Impression Management Theory* program CSR ini sangat berkaitan dengan pencitraan yang bertujuan untuk memberikan kesan positif yang dibangun oleh perusahaan.

Pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau pemegang saham, tetapi juga *stakeholders* lain yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya tergantung pada *core* bisnis perusahaan yang bersangkutan (Sharma *et al*, 2009).

### **1. Pengungkapan Aspek Sosial PT Bumi Bukit Asam (Persero) Tbk**

Aspek lain yang disyaratkan oleh GRI untuk diungkapkan dalam mewujudkan pembangunan keberlanjutan yaitu aspek sosial. Aspek sosial mencakup praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

Dalam aspek praktek tenaga kerja, PTBA memiliki program-program pelatihan dan pengembangan kepada karyawan dengan tujuan untuk

meningkatkan keahlian, pengetahuan dan profesionalisme karyawan seperti yang diungkapkan dalam *sustainability report* PTBA :

*“Perseroan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan SDM, tanpa memperhatikan gender, ras dan agama. Program pelatihan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelatihan Tahunan yang disusun berdasarkan Training Need Analysis (TNA) untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan profesi/sertifikasi.” (Sustainability Report tahun 2015 halaman 107).*

Dalam aspek hak asasi manusia, PTBA memiliki komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia. Sesuai dengan praktek ketenagakerjaan PTBA, seluruh karyawan mendapatkan hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin untuk keselamatan, kesehatan dan lingkungan, peluang karir, pelatihan dan pengembangan, rotasi dan mutasi, menduduki jabatan tertentu, serta tunjangan.

*“Perseroan sangat berkomitmen untuk memperhatikan aspek pengakuan dan penegakan HAM dalam setiap kegiatan operasionalnya. Kebijakan kebebasan berserikat, berpolitik dan menyalurkan aspirasi politik secara demokrasi maupun memberikan sumbang saran bagi kemajuan perusahaan (melalui Serikat Pegawai maupun saluran yang disediakan untuk maksud tersebut) adalah salah satu wujud penghargaan terhadap HAM..” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 193).*

Dalam hidup bermasyarakat, PTBA juga mengedepankan wujud kepedulian dalam mencapai pengembangan masyarakat yang berkelanjutan seperti yang diungkapkan dalam *sustainability report* PTBA tahun 2014 halaman 226-228 diantaranya dengan pelaksanaan Program Kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi di sekitar wilayah operasi Perseroan agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perseroan. Sedangkan sasaran dari kegiatan Bina Lingkungan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan tumbuh berkembangnya kesadaran akan perlunya pendidikan, interaksi sosial dan keselarasan dengan kelestarian



lingkungan. Selain menyalurkan dana Kemitraan, PTBA juga melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan kepada 30 orang mitra binaan, serta bantuan promosi produk mitra binaan melalui kegiatan pameran sebanyak 4 kali di beberapa kota, yaitu Jakarta, Palembang, dan Muaraenim.

Sedangkan dalam aspek tanggung jawab produk, PTBA juga berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan sebagaimana yang diungkapkan dalam sustainability report PTBA :

*“Pusat pengaduan pelanggan telah dikembangkan PTBA untuk menampung pertanyaan maupun pengaduan, baik dari masyarakat maupun dari pelanggan. Hal ini dilakukan sebagai wujud kesadaran akan makna penting dan manfaat dari pemenuhan standar kualitas serta perlindungan konsumen terhadap setiap produk yang dihasilkan. Keduanya disadari oleh Perseroan karena mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan kinerja usaha yang berkesinambungan.”* (Sustainability Report tahun 2015 halaman 113-114).

*“PTBA mengkoordinasikan berbagai upaya untuk menjamin kualitas produk agar sesuai dengan yang diinginkan konsumen, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pembelian, dan sesuai dengan spesifikasi produk yang dicantumkan pada brosur marketing (marketing kit) maupun bahan presentasi pemasaran.”* (Sustainability Report tahun 2014 halaman 234).

*“Untuk menjamin semua proses berjalan sesuai rencana, maka PTBA melakukan rapat rutin tiap bulan, yaitu rapat koordinasi dan planing meeting, yang secara garis besar membahas kinerja supply chain seperti target penjualan, target produksi, target angkutan, dan target kualitas. Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk menjamin kepuasan konsumen. Berkaitan dengan hal ini, pada 2014, tidak adalaporan terjadinya kasus pelanggaran ketentuan produk dan pemenuhan kontrak yang dilakukan PTBA. (Jika ada, sebutkan jumlah dan solusi yang diambil). G4-PR7”* (Sustainability Report tahun 2014 halaman 234-235).

Dalam aspek sosial, PTBA juga telah melaporkan praktik *sustainability report*-nya belum terlalu maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam *sustainability report* tahun 2014 yang hanya mengungkapkan 36 item dari 48 item aspek



pengungkapan sosial yang di syaratkan oleh GRI versi 4 dan 2015 yang cukup maksimal, yaitu 45 item dari 48 item yang di syaratkan oleh GRI versi 4.

## **2. Pengungkapan Aspek Sosial PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.**

Selain aspek ekonomi, aspek lain yang wajib diungkapkan dalam *sustainability report* sebagaimana yang disyaratkan oleh GRI yaitu aspek sosial yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat, dan tanggung jawab produk. Dalam aspek sumber daya manusia , PGN memandang pekerja sebagai mitra dalam upaya meningkatkan laba, mitra dalam melaksanakan tugas operasional dan mitra dalam meningkatkan produktivitas. Pelaksanaannya dilakukan melalui keterlibatan tiga pihak, yakni pekerja, serikat pekerja dan perusahaan.

*“The human resource quality development program is inseparable from education and training programs we design for our people, and it is through these programs that we expect to raise the competencies and performance of every person employed by PGN.” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 149).*

*“PGN develops training programs that are adjustable to the demands of the respective positions of its employees. These programs have been devised in a planned, systematic and focused manner to improve workforce competence.”. (Sustainability Report tahun 2015 halaman 143).*

Selain itu, PGN dalam mengelola ketenagakerjaan selalu tunduk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan, PGN yakin hal itu akan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dalam hubungan kerja.

Dalam hal hak asasi manusia, PGN juga menjunjung tinggi hak asasi pekerjaannya sebagaimana dijelaskan berikut :

*“PGN strives to attract the best talents to work together with PGN, to achieve a common goal. In running the business, PGN ensures that the basic human rights of all of its employees are upheld at all times. [G4-DMA]”.* (Sustainability Report tahun 2015 halaman 136).

Dalam hidup bermasyarakat, PGN juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. PGN berkomitmen penuh dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan diwujudkan melalui berbagai program di bidang sosial kemasyarakatan yang secara umum dikenal dengan istilah *“Corporate Social Responsibility”* (CSR).

*“As one of our stakeholders, we understand how communities want to grow with the company. For this reason, PGN has developed its Corporate Social and Environmental Responsibility program, which is more commonly known as Corporate Social Responsibility (CSR). This program encompasses the Stewardship Program and Corporate Social and Environmental Responsibility with the objective of improving welfare and quality of life.”* (Sustainability Report tahun 2014 halaman 160).

*“...This program emphasizes community economic development so that the business capabilities of SMEs can be improved to become more resilient and self-reliant.”* (Sustainability Report tahun 2015 halaman 82).

Sedangkan dalam aspek tanggung jawab produk, PGN juga berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan sebagaimana yang diungkapkan dalam sustainability report PGN :

*“PGN aims to achieve customer satisfaction among others by fulfilling various customer expectations. PGN especially pays attention to the quality and quantity of gas that it supplies, exceptional service, and competitive pricing. PGN is fully committed to fulfilling all customer expectations in accordance with a component of its corporate culture: “Prioritizing the satisfaction of both internal and external customers by providing the best service.”* (Sustainability Report tahun 2015 halaman 126).

Untuk menunjukkan pelaksanaan komitmen dan untuk memenuhi harapan para pelanggan, PGN mencanangkan pelaksanaan berbagai program yang ditujukan untuk memenuhi harapan tersebut dan meningkatkan kepuasan para

pelanggan diantaranya mengenai kejelasan informasi produk, menjaga mutu produk sesuai regulasi dan standar, layanan kepada pelanggan hingga pengukuran kepuasan pelanggan.

Dalam aspek sosial, PGN melaporkan praktik *sustainability repor-tnya* belum secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam *sustainability report* tahun 2014 dimana PGN hanya mengungkapkan 25 dari 48 item pengungkapan dalam aspek sosial yang disyaratkan oleh GRI version 4. Sedangkan pada tahun 2015 PGN hanya mengungkapkan 23 dari 48 item pengungkapan aspek sosial yang disyaratkan oleh GRI version 4.

### **3. Pengungkapan Aspek Sosial PT Freeport Indonesia Tbk.**

Aspek sosial juga merupakan aspek yang mendukung pembangunan berkelanjutan yang sama halnya dengan aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek sosial meliputi tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, komunitas masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam aspek tenaga kerja, PT Freeport Indonesia memandang karyawan sebagai sebagai aset utama bagi perusahaan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan pengelolaan sumber daya manusianya dan juga menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, seperti yang tercantum dalam *sustainability report* berikut :

*“Program regional kami untuk memberi pelatihan teknik bertujuan menyiapkan sumber daya manusia dari masyarakat setempat agar dapat menempuh karir di bidang pertambangan, kendati peserta latihan tidak diwajibkan bergabung dengan perusahaan. Institut Pertambangan Nemangkawi di Papua, Indonesia, berhasil menempatkan pemegang lulusannya, yang lebih dari 90 persen merupakan warga Papua asli, sebagai karyawan tetap maupun sebagai kontraktor di PTFI. Seiring*

*persiapan PTFI untuk beralih dari sistem pertambangan terbuka menuju pertambangan bawah tanah, Nemangkawi menjalani transisi dari fokus utama melatih karyawan baru ke fokus melatih kembali karyawan yang ada.”. (Sustainability Report tahun 2014 halaman 13).*

*“Setelah terjadinya berbagai peristiwa kecelakaan di PTFI, Freeport-McMoRan menjalankan sejumlah tindakan dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja, termasuk mengundang pihak ketiga untuk menyelenggarakan tinjauan terhadap beberapa kategori risiko tertentu yang berpotensi menimbulkan fatalitas besar.”. (Sustainability Report tahun 2014 halaman 17).*

*“Kegiatan operasional Freeport-McMoRan menyelenggarakan program kesehatan kerja yang komprehensif guna mengevaluasi risiko paparan terhadap risiko kesehatan kerja serta menerapkan kendali yang memadai bagi tenaga kerja kami. Panduan Lapangan kami bagi Kesehatan Kerja dan Higina Industri (Field Guide for Occupational Health and Industrial Hygiene) mencantumkan definisi batas-batas paparan, serta standar dan praktik yang berlaku secara global. Setiap tugas ditempat kerja mencakup evaluasi terhadap bahaya fisik, selain kemungkinan konsekuensi dari penyakit akibat pekerjaan.”. (Sustainability Report tahun 2014 halaman 17)*

Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, PT Freeport Indonesia melakukan banyak hal untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat tempat dimana perusahaan beroperasi diantaranya melakukan program sosial terpadu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi pembangunan, pelestarian hidup bersih dan sehat serta upaya pro-aktif pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan (Sustainability Report tahun 2014).

Dalam aspek komunitas masyarakat, PT Freeport Indonesia memandang keterlibatan masyarakat menjadi komitmen pembangunan berkelanjutan yang fundamental. Hubungan baik dengan komunitas masyarakat harus terus dijaga dengan berbagai bentuk kerjasama guna mencapai kesejahteraan bersama.

*“PTFI tengah bekerja sama dengan pemerintah setempat dan lembaga terkait untuk mencari mata pencaharian alternatif untuk para pendulang. Bagi anggota masyarakat setempat, program-program pengembangan ekonomi berbasis desa termasuk koperasi kopi dan kakao*

*merupakan bidang pekerjaan saat ini, dan pengenalan metode penanaman tumpang sari yaitu menanam sayur dan tanaman cepat tumbuh lainnya, untuk peluang peningkatan penghasilan.” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 27).*

Aspek terakhir yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aspek sosial yaitu aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam melakukan aktivitas operasi sehari-hari, PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk mematuhi semua aturan yang terkait dengan HAM, seperti yang dijelaskan berikut :

*“The Voluntary Principles on Security and Human Rights serve as guidelines for our security and human rights programs, interactions with host government police and military personnel, and with private security contractors. We also are integrating the UN Guiding Principles on Business and Human Rights into our business systems.” (Sustainability Report tahun 2015 halaman 10).*

Dalam aspek sosial, walaupun PT Freeport Indonesia mengungkapkan banyak hal terkait aktivitasnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, namun tetap saja masih banyak kendala yang dihadapi seperti yang diungkapkan dalam laporan bahwa pada tahun 2014 terdapat dugaan kasus pelanggaran HAM dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di perusahaan. Selain itu, pada tahun 2009, terjadi serangkaian insiden penembakan terhadap karyawan perusahaan, kontraktor dan aparat keamanan di dalam wilayah proyek PTFI sepanjang jalan akses terpusat dan jalan tanggul timur. Insiden penembakan masih berlanjut secara sporadis, terakhir terjadi pada 1 Januari tahun 2015 yang mengakibatkan tewasnya seorang karyawan pengamanan PTFI dan dua personil Brimob. Sejak awal tahun 2009 hingga Januari 2015 telah terjadi 20 korban kematian dan 59 kasus cedera terhadap karyawan, karyawan kontraktor, aparat keamanan dan masyarakat sipil akibat insiden penembakan, hal tersebut cukup mengkhawatirkan. Hingga saat ini belum ada pihak yang menyatakan

bertanggung jawab atas penembakan tersebut, dan pihak berwajib dari pemerintah Indonesia masih melakukan pengusutan terhadap hal ini. Hal ini tentunya memberikan citra negatif yang dapat merusak legitimasi perusahaan di mata para *stakeholders*.

#### **D. Pengungkapan Aspek Lingkungan Perusahaan**

Proses penyelarasan antara program *Corporate Social Responsibility* dan strategi perusahaan adalah hal yang tidak mudah. Melalui program CSR yang bersinergi dengan strategi perusahaan diharapkan permasalahan sosial, lingkungan, kesejahteraan sosial maupun kebutuhan strategis bisnis dapat terjawab, sehingga tidak ada lagi bahwa program *Corporate Social Responsibility* dan tujuan bisnis perusahaan saling bertolak belakang (Kotler, 2005).

Jauh sebelum didengungkan kegiatan CSR sebenarnya tanpa disadari program tanggung jawab sosial telah dijalankan. Tanggung jawab sosial yang dijalankan awalnya sebagai kegiatan amal perusahaan. Tanggung jawab perusahaan sebenarnya sudah mulai harus dipenuhi pada saat pendirian perusahaan dengan adanya Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembuatan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKLRL) sebagai wujud tanggung jawab pada lingkungan. *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan oleh perusahaan karena dorongan pihak eksternal dan internal perusahaan.

##### **1. Pengungkapan Aspek Lingkungan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.**

Aspek terakhir yang harus diungkapkan perusahaan dalam *sustainability report* menurut pedoman GRI adalah aspek lingkungan. Indikator lingkungan

meliputi kinerja yang berhubungan dengan bahan, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, produk jasa, kepatuhan, transportasi, lain-lain, asesmen pemasok atas lingkungan, dan mekanisme pengaduan masalah lingkungan (GRI Version 4 2013-sekarang). Menurut PTBA, sejak pertama kali beroperasi, PTBA menerapkan manajemen lingkungan hidup yang komprehensif dan terencana, mulai dari identifikasi dampak lingkungan sampai dengan penerapan dan pemantauan rencana mitigasi yang diimplementasikan di setiap tahapan proses penambangan dan aktivitas operasional sebagaimana yang diungkapkan dalam *sustainability report* berikut :

*“Selama kajian Proper dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, telah dilakukan Benchmarking oleh Morgan Stanley Capital International mengenai emisi, manajemen limbah, manajemen lingkungan dan tata kelola perusahaan PTBA. PTBA menempati posisi 3 besar untuk emisi, manajemen limbah, dan manajemen lingkungan dari hasil benchmarking ini.” (Sustainability Report tahun 2015 halaman 11).*

Aspek lingkungan juga telah diungkapkan secara maksimal oleh PTBA dalam *sustainability report* tahun 2015 yang mengungkapkan 33 item dari 34 item pengungkapan yang disyaratkan dalam pedoman GRI. Dengan mengungkapkan seluruh item pengungkapan yang disyaratkan oleh GRI baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, maka dapat dipastikan bahwa PTBA telah melakukan seluruh aktivitasnya sesuai dengan pedoman yang ada. PTBA juga menjamin akurasi data dan informasi yang diberikan dengan melalui proses *assurance* dari pihak ketiga yang independen dan kompeten, yakni KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan *Pricewaterhouse Coopers* sebagai pihak ketiga independen. Dari kedua proses tersebut menyatakan bahwa laporan *sustainability* PTBA pada tahun 2014-2015 telah memenuhi



tingkat aplikasi GRI dengan kriteria “A” dimana hal ini setara dengan pemimpin industri global seperti BHP Billiton.

Kriteria atau level “A” merupakan indikator bahwa perusahaan telah melaporkan semua indikator yang diterbitkan oleh GRI. Dengan demikian, PTBA telah maksimal dalam melakukan tanggung jawab sosialnya yang dapat dilihat dari pengungkapan keseluruhan indikator oleh GRI dalam *sustainability report* PTBA sehingga dengan hal tersebut PTBA akan mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari publik yang dapat meningkatkan *image* positif perusahaan.

## **2. Pengungkapan Aspek Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.**

Selain aspek ekonomi dan sosial, aspek lain yang diharuskan untuk diungkapkan menurut pedoman GRI adalah aspek lingkungan. Dalam hal menjaga kelestarian lingkungan, PGN menyusun dan melaksanakan program Pengelolaan Lingkungan sebagai wujud komitmen perusahaan atas pelestarian lingkungan.

*“PGN continues its commitment to environmental conservation and participation in the mitigation of greenhouse gases (GHG), in order to become an environmentally friendly company that is driven by the spirit of green and clean energy for life.”. (Sustainability Report tahun 2015 halaman 88).*

Pada tahun 2015, PGN memperbarui visi, kebijakan, komitmen dalam lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan (K3PL). PGN juga berusaha menerapkan prinsip *sustainability* dengan tidak hanya menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, namun turut pula aktif dalam optimalisasi pemanfaatan energi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kebijakan lingkungan dan energi terintegrasi dalam K3PL.



Kebijakan ini dinamakan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan dan Energi (SMK3PL-E). Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari Kebijakan K3PL sebelumnya.

Aspek lingkungan yang diungkapkan oleh PGN pada tahun 2014 juga belum maksimal. Hal ini terlihat dalam *sustainability report* PGN tahun 2014 yang hanya mengungkapkan 14 dari 34 item pengungkapan yang disyaratkan oleh GRI version 4. Hal yang sama juga terlihat pada *sustainability report* PGN tahun 2015 yang hanya mengungkapkan 12 dari 34 item pengungkapan yang disyaratkan oleh GRI version 4.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 PGN belum secara maksimal mengungkapkan seluruh item pengungkapan yang disyaratkan oleh GRI khususnya aspek sosial dan lingkungan. Terpenuhinya seluruh pengungkapan aspek ekonomi dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih lebih mementingkan kinerja perusahaan dalam bidang ekonomi dibandingkan dua bidang lainnya yaitu sosial dan lingkungan. Pada tahun 2014 dan 2015, PGN belum mengungkapkan secara maksimal seluruh item pengungkapan yang disyaratkan oleh GRI. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh PGN bahwa pada tahun 2014 dan 2015 ada perubahan pedoman yang digunakan yang harus disesuaikan oleh PGN dari pedoman GRI 3.1 menjadi GRI 4 pada tahun 2013. Adanya upaya yang maksimal yang dilakukan oleh PGN dalam mengungkapkan seluruh item pengungkapan dalam *sustainability report*-nya sesuai dengan pedoman GRI merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi dari publik bahwa PGN dalam melakukan aktivitasnya yang tertuang

dalam *sustainability report* telah memenuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut akan meningkatkan citra positif perusahaan.

### 3. Pengungkapan Aspek Lingkungan PT Freeport Indonesia

Aspek terakhir yang harus diungkapkan dalam *sustainability report* menurut pedoman pelaporan GRI adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan juga dianggap penting untuk dijaga karena lingkungan dapat dengan mudah rusak akibat operasi-operasi perusahaan yang tidak terkontrol. PT Freeport Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan dari dampak aktivitasnya dengan melakukan berbagai upaya pencegahan ataupun perbaikan, termasuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*“Fokus utama dari Laporan Berkarya Menuju Pembangunan Berkelanjutan ini adalah pada kegiatan operasional kami di bidang pertambangan dan logam yang mengimplementasikan program-program yang dikembangkan sejalan dengan Kerangka Kerja ICM untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kendati kegiatan minyak dan gas kami berada di luar batasan kerangka kerja tersebut, FM O&G dijalankan sesuai dengan semua kebijakan dan struktur tata kelola Freeport-McMoRan. Beroperasi di bidang industri yang diatur secara ketat di Amerika Serikat, FM O&G menjalankan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup serta prosedur tanggap darurat yang diaudit. Usaha ini pun memiliki mekanisme pelibatan pemangku kepentingan, terutama sekeliling kegiatan kami di daratan yang berdekatan dengan wilayah padat penduduk.” (Sustainability Report tahun 2014 halaman 6)*

*“Our operations also are routinely inspected by regulatory agencies or ministries of host governments. The health and safety management systems and environmental management systems of our operations obtain independent certification to Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 and International Organization for Standardization (ISO) 14001, respectively. These systems include corrective and preventive action tracking for internal and external audit findings.” (Sustainability Report tahun 2015 halaman 9)*

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan audit lingkungan,

pengendalian emisi, daur ulang dan konservasi energi, pengendalian sirsat dan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati, pelestarian sumber daya air, serta pemantauan lingkungan secara berkala. Berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan bertujuan untuk melestarikan lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi, selain itu juga sebagai bentuk komitmen kepedulian perusahaan yang pada akhirnya akan membentuk citra positif perusahaan di mata publik

Dari penjelasan mengenai pengungkapan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dalam *sustainability report* PT Freeport Indonesia dapat dilihat bahwa upaya perusahaan mengungkapkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan belum maksimal mengikuti panduan pelaporan yang dikeluarkan GRI. Untuk tahun 2014, PT Freeport Indonesia menjelaskan bahwa perusahaan belum menggunakan panduan pelaporan GRI. Pada tahun 2015 perusahaan untuk pertama kalinya menggunakan panduan GRI G-4. Namun dalam pelaporannya, masih banyak item pengungkapan yang belum dilaporkan dalam *sustainability report*. Untuk aspek ekonomi, PT Freeport Indonesia baru mengungkapkan 4 dari 9 item yang disyaratkan oleh GRI G-4, sedangkan untuk aspek lingkungan PT Freeport Indonesia mengungkapkan 20 dari 34 item.

***E. Realitas Corporate Social Responsibility yang Membingkai Kapitalisme dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory***

Untuk mencapai tujuan yang hakiki dalam melaksanakan program CSR, maka perusahaan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR merupakan

suatu bentuk pertanggung jawaban kepada Allah, melalui manusia dan alam sekitar. Pelaksanaan CSR dijangkakan memberi kesan positif dalam menyelesaikan dan meringankan permasalahan sosial, baik yang terjadi dalam perusahaan maupun masyarakat terutama untuk memperkasakan ekonomi masyarakat dan kestabilan (*sustainability*) perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekedar keuntungan (*profitability*).

Dalam Al-quran telah dijelaskan bahawa harus berlaku adil dan berakhlak mulia demi terciptanya sebuah *ukhuwah Islamiah* akhlak yang baik dalam menjalankan ekonomi akan mengutuk sistem ekonomi yang mementingkan keuntungan semata-mata tanpa mengendahkan kesengsaraan orang lain. Maka keadilan sosial akan terwujud dengan erat atas dasar *ukhuwah Islamiyah* sehingga dapat mewujudkan kesamaan diantara manusia tanpa mengira warna kulit, ras, bahasa, dan kedudukan dalam masyarakat (Asyraf, *et al.*, 2010). Allah berfirman dalam Al-quran:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Al-Hujarat: 10)

# 1. PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTBA telah menyajikan informasi berkaitan dengan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan secara maksimal dan telah memenuhi seluruh item-item yang disyaratkan oleh GRI. Selain itu, PTBA

juga telah menyajikan indikator-indikator tambahan sesuai dengan *Metal and Mining Sector Supplement* (MMSS) yang juga diterbitkan oleh GRI, serta menyajikan informasi mengenai aktivitas perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya baik informasi positif maupun negatif. Di tahun 2015, dalam aktivitas operasional PTBA pernah terjadi satu insiden kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Namun dalam laporan tahunan yang sama, PTBA menjelaskan kejadian tersebut dan mengakui bahwa hal tersebut murni akibat kecelakaan kerja yang karena itu, PTBA akan terus berusaha membenahi dan meningkatkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di semua tahap operasional. Dari kejadian itu, hasil investigasi, rencana tindak lanjut, pembelajaran, dan rekomendasi dari pihak eksternal terkait insiden tersebut telah di diseminasi dan ditindaklanjuti oleh seluruh bagian di Perusahaan.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dijelaskan bahwa interaksi sosial yang terjadi antara PTBA dengan *stakeholders*-nya dilakukan tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan semata, tapi juga sebagai bentuk upaya kesadaran perusahaan untuk melaporkan setiap aktivitas perusahaan dalam bingkai keberlanjutan. Dalam perspektif *shariah enterprise theory*, interaksi sosial PTBA dengan *stakeholders*-nya dapat dikategorikan sebagai interaksi yang berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*) karena dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bersama para *stakeholders*-nya. Sehingga dapat dipahami dan disimpulkan bahwa PTBA dapat memahami realitas praktik CSR sebagai keberlanjutan humanis (*humanism sustainability*) karena dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa perusahaan tidak

dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya interaksi dengan para *stakeholders*-nya khususnya kepada *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam tempat perusahaan beroperasi yang secara tidak langsung mengacu pada upaya dalam memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT.

## 2. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Hasil analisis melalui metode kritis menunjukkan bahwa pada tiap tahunnya PGN telah berusaha melakukan praktik *sustainability* sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh GRI, PSAK, aturan terkait CSR dan telah berusaha menerapkan prinsip etika bisnis dalam operasional perusahaan. PGN juga telah berusaha secara terbuka menyajikan informasi mengenai kinerja keberlanjutannya sesuai fakta yang ada baik negatif maupun positif. PGN pernah terjerat kasus hukum dalam menjalankan operasionalnya, baik terkait sengketa pembebasan lahan, penyelesaian kontrak, maupun perkara lainnya. Dari temuan tersebut jika ditinjau dari perspektif *shariah enterprise theory* dapat diketahui bahwa interaksi sosial yang terjadi antara PGN dengan *stakeholders*-nya merupakan interaksi sosial yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (*system mechanism*). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa PGN dalam memahami realitas CSR masih sebatas tataran *social contact theory* dimana praktik CSR dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi dari publik. Dalam konteks ini, praktik CSR dilakukan oleh PGN semata-mata sebagai upaya untuk memenuhi peraturan atau kewajiban yang telah ditentukan.

PGN pada awalnya memang belum dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh GRI dalam melaporkan *sustainability*-nya. Hal

itu terlihat jelas dalam praktik CSR PGN sehingga realitas CSR yang terefleksi dalam *sustainability report* PGN akan bermuara pada keberlanjutan semu (*pseudo sustainability*). Namun pada periode-periode selanjutnya, PGN telah berusaha untuk menata dan memperbaiki kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan juga telah mampu memenuhi aturan dalam melakukan praktik CSR. Sehingga dengan temuan tersebut menunjukkan bahwa realitas CSR yang kini dipahami oleh PGN yang terefleksi dalam *sustainability report*-nya akan bermuara pada keberlanjutan wajib (*obligatory sustainability*).

PGN melakukan aktivitasnya karena adanya unsur keterpaksaan oleh mekanisme sistem (*system mechanism*) yang dipengaruhi oleh *steering* media baik *media money* (pertimbangan ekonomis) maupun *media power* (peraturan). Berdasarkan perspektif *shariah enterprise theory* dapat disimpulkan bahwa, praktik CSR yang dijalankan oleh PGN dapat mengarah kepada sistem kapitalisme. Hal ini di dukung dengan pelaksanaan praktik CSR yang terkesan mengikuti aturan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukan karna kesadaran dari perseroan sendiri.

### 3. PT Freeport Indonesia

Hasil penelitian dengan metode kritis menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia belum maksimal dalam mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan dalam *sustainability report*-nya dan belum memenuhi seluruh item pengungkapan yang disyaratkan oleh GRI. PT Freeport Indonesia juga belum secara terbuka menyajikan informasi mengenai aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai berita di media. Temuan ini

mengindikasikan bahwa PT Freeport Indonesia dalam memahami realitas CSR masih sebatas dalam tataran *social contract theory* dimana praktik CSR dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi dari publik yang mengindikasikan adanya praktik kapitalisme. Dalam hal ini, praktik CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia diusahakan agar terlihat memenuhi segala peraturan yang ada dengan mengabaikan fakta-fakta negatif di media agar tetap terlihat baik di mata publik guna mencapai laba yang maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realitas CSR yang dipahami oleh PT Freeport Indonesia yang terefleksi dalam *sustainability report* masih sebatas keberlanjutan semu (*pseudo sustainability*) karena belum sepenuhnya dapat memenuhi segala ketentuan yang berlaku dan belum memiliki kesadaran bahwa perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan *shariah enterprise theory*, praktik CSR yang dilakukan PTFI jelas menunjukkan adanya unsur kapitalisme didalam praktiknya. Ini di dasari karen, PTFI melakukan CSR hanya untuk menutupi fakta-fakta negatif yang terjadi akibat dari operasional perusahaan yang menyebabkan banyak kerugian pada masyarakat dan lingkungan tempat PTFI bekerja. Banyaknya berita-berita negatif yang diangkat di media semakin menunjukkan bahwa PTFI hanya melakukan kegiatan praktik CSR dengan unsur kedermawanan yang bersifat kapitalisme.



***F. Realitas Praktik Corporate Social Responsibility Perusahaan menurut Shariah Enterprise Theory***

Dari penjelasan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa PT Bumi Asam (Persero) Tbk., PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dan PT Freeport Indonesia telah menjalankan dan melaporkan tanggungjawabnya dalam aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan yang terefleksi dalam *sustainability report*. Namun hasil penelitian juga menunjukkan tingkat pemahaman yang berbeda ketiga perusahaan tersebut mengenai realitas *sustainability* dalam praktik CSRnya. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. telah memahami realitas praktik CSR sebagai keberlanjutan humanis (*humanism sustainability*) karena dilakukan berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*) dan telah memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah disyaratkan bahwa interaksi sosial yang terjadi antara PTBA dengan *stakeholders*-nya dilakukan tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban terhadap peraturan semata, tapi juga sebagai bentuk upaya kesadaran perusahaan untuk melaporkan setiap aktivitas perusahaan dalam bingkai keberlanjutan bahwa perusahaan tidak dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya interaksi dengan para *stakeholders*-nya khususnya masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi yang kemudian dikembalikan kepada Sang Pencipta. Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam memahami realitas CSR masih sebatas keberlanjutan wajib (*obligatory sustainability*) karena telah berusaha untuk menata dan memperbaiki kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan juga telah mampu memenuhi aturan dalam melakukan praktik CSR. Jika dilihat

dari perspektif *shariah enterprise theory*, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. melakukan aktivitasnya karena adanya unsur keterpaksaan oleh mekanisme sistem (*system mechanism*) yang dipengaruhi oleh *steering media* baik *media money* (pertimbangan ekonomis) maupun *media power* (peraturan). Berbeda dengan keduanya, PT Freeport Indonesia memahami realitas CSR sebagai keberlanjutan semu (*pseudo sustainability*) karena belum sepenuhnya dapat memenuhi segala ketentuan yang berlaku, belum melakukan pengungkapan yang informatif sesuai berita di media dan belum memiliki kesadaran bahwa perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial dan masyarakat. Dalam hal ini, praktik CSR yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia diusahakan agar terlihat memenuhi segala peraturan yang ada dengan mengabaikan fakta-fakta negatif di media agar tetap terlihat baik di mata publik guna mencapai laba maksimal yang merujuk kepada sifat kapitalisme.

Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia. Meutia turut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan sebahagian daripada usaha untuk menjadi *Rahmatan Lil'alam* dan mencapai tujuan utama dalam ekonomi Syariah (Mukhazir, *et al.*, 2006). Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*). Kesejahteraan dalam tujuan Syariah, dinyatakan Al Ghazali tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, malah ia juga untuk kepentingan semua *stakeholders*

(*masalah*) (Al-Ghazali, *et al.*, 2012). Konsep ini selaras dengan *rahmatan lil-'alamin* dipetik dari salah satu ayat Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahan:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (An Abiyah: 107).

Dua peranan utama yang dimainkan oleh manusia ialah yang pertama sebagai hamba Allah dan yang kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi (Norajilah, 2011). Sebagai hamba, manusia harus menghambakan diri kepada tuhan penciptanya, mencari keredhaan Allah, mematuhi segala aturan dan panduan yang telah di tetapkan, berbuat baik kepada sesama makhluk dan mengelakkan daripada membuat kerosakan di muka bumi Allah ini. Oleh karena itu, SET memiliki keprihatinan yang luas pada *stakeholders*. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam (Triyuwono: 2007).

Allah SWT merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung antara manusia dan perseroan tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Kepentingan menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai asas bagi pelaksanaan semua kegiatan yang dijalankan perseroan. Dalam kaitannya dengan perseroan, PTBA telah bertanggungjawab untuk menguatkan Syariah Islam dalam segenap aspek kehidupannya, memastikan keharmonisan, keamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat dan karyawannya, walaupun PTBA bukan perseroan berbasis syariah,

namun PTBA telah berhasil menjalankan konsep CSR menurut *shariah enterprise theory*.

Rasulullah menjelaskan dalam hadis semua perkara yang boleh membawa kepada kekuatan *ukhuwwah Islamiyyah*:

المُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya masyarakat Islam mestilah seperti sebuah bangunan yang tersergam kukuh. Ini sangat berkait rapat dengan kehidupan sosial di dunia ini, karena keadilan sosial merupakan sebuah cara untuk melawan dan memerangi kezaliman. Oleh kerana itu agama Islam merupakan satu agama yang adil dan menekankan umatnya untuk mengaplikasikan pelaksanaan keadilan dalam kehidupan. Ini jelas dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al Maidah: 8).

Dengan mengambil pendekatan Islam dalam menyusun dan membangun perseroan, perseroan perlu memberi keutamaan kepada strategi keadilan sosial (*al'adl al ijtima'iyah*) dalam membangunkan usahanya. Hasilnya jaminan sosial kepada masyarakat akan tercapai (Nik Mustapha. 2007).

### G. *Pengajuan Ide Penyadaran dan Pencerahan*

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan Al-Quran dan ditinjau kritis dengan *shariah enterprise theory* tidak hanya berhenti pada proses memperoleh pemahaman mengenai objek studi, tapi juga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengajukan ide penyadaran dan pencerahan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan keadaan objek studi. Adapun ide penyadaran dan pencerahan yang peneliti ajukan adalah berupa saran kepada manajemen perusahaan agar senantiasa memenuhi segala peraturan yang berlaku yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan dan juga senantiasa memahami etika bisnis dalam menjalankan aktivitas operasinya. Selain itu, manajemen perusahaan juga harus memahami bahwa perusahaan beroperasi dalam sistem sosial yang kompleks sehingga perusahaan harus memperhatikan, menjaga dan melestarikan kondisi lingkungan alam sekitar tempat perusahaan beroperasi dan berusaha menjadi *partner* masyarakat dalam banyak hal khususnya menyangkut kepentingan bersama masyarakat, dimana semua kegiatan yang dilakukan perusahaan harus berdasarkan prinsip berketuhanan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Terjemahannya:

“...(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al Hajj: 41)

Sehingga keberadaan perusahaan tidak lagi dianggap sebagai ancaman eksploitasi oleh masyarakat sekitar. Selain itu, peneliti juga memberikan saran kepada para *stakeholders* termasuk akademisi untuk selalu mengawasi kinerja perusahaan dalam berbagai aspek. Segala pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan perusahaan harus dapat dideteksi lalu dilaporkan kepada pihak pemerintah atau pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi atas pelanggaran atau kecurangan tersebut, sehingga diharapkan ke depannya aktivitas perusahaan berada di koridor yang tepat. Dengan demikian, dunia usaha diharapkan dapat menemukan konsep yang tepat, lebih humanis, dan berketuhanan dalam menjalankan aktivitasnya sehingga realitas prakti CSR dapat dipahami sebagai keberlanjutan humanis (*humanism sustainability*) yang sesuai dengan prinsip syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga perusahaan yang diteliti telah melaporkan praktik tanggungjawabnya terkait aktivitas perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terefleksi dalam *sustainability report*. Namun terdapat hasil yang berbeda dari ketiga perusahaan tersebut dimana dalam *sustainability report* PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dinilai sebagai praktik CSR bernuansa positif karena telah mengungkapkan aktivitasnya secara terbuka baik dalam hal positif maupun negatif tidak ditemukan adanya unsur kapitalisme yang tercantum dalam *sustainability report*-nya. Berbeda dengan PT Freeport Indonesia dinilai sebagai praktik CSR negatif karena pengungkapan yang digunakan hanya bertujuan untuk memengaruhi publik dengan pengungkapan yang berlebihan dan cenderung menutupi fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi. Dimana dalam praktiknya, PTFI dalam mengaplikasikan CSR tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh GRI dan *shariah enterprise theory*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa interaksi sosial perusahaan dengan para *stakeholders*-nya dilakukan dengan cara yang berbeda, sehingga pemahaman mengenai realitas *sustainability* pun berbeda-beda dari ketiga perusahaan tersebut. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. memahami realitas *sustainability* sebagai keberlanjutan humanis (*humanism sustainability*) karena interaksi sosial dilakukan berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*) dan lingkungan yang

kemudian dikembalikan kepada Sang Pencipta, dan kesadaran untuk memenuhi segala peraturan yang disyaratkan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. memahami realitas *sustainability* sebagai keberlanjutan wajib (*obligatory sustainability*) karena interaksi sosial yang dilakukan masih sebatas pemenuhan kewajiban terhadap peraturan semata, dan PT Freeport Indonesia memahami realitas *sustainability* sebagai keberlanjutan semu (*pseudo sustainability*) karena belum memahami interaksi sosial sebagai sebuah kebutuhan dan masih melakukan aktivitas dengan mengabaikan peraturan yang ada sehingga aktivitas operasi perusahaan hanya berorientasi laba semata.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Konsekuensi logis dari kesimpulan yang diperoleh khususnya berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dapat dilaksanakan perusahaan mengandung implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya :

1. Perbedaan tingkat pemahaman mengenai realitas *sustainability* oleh perusahaan menggambarkan adanya perbedaan kesadaran dalam menjalankan praktik CSR. Beberapa perusahaan melakukan praktik CSR masih sebatas bentuk pemenuhan terhadap kewajiban yang disyaratkan oleh peraturan. Sehingga pada masa mendatang, diharapkan perusahaan mampu melakukan praktik CSR yang dilandasi oleh kesadaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis dan prinsip syariah bahwa perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan



masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi sehingga keberlanjutan dipahami sebagai nilai-nilai humanis dan nilai-nilai syariah.

2. *Corporate Social Responsibility* telah dilaksanakan diharapkan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan agar dapat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika, diharapkan akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*), konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsenpun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

3. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis *sustainability report* tiga perusahaan pertambangan dan migas dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Penelitian ini juga bersifat analisa mendalam sehingga hasil penelitian ini tidak bisa dan tidak pantas untuk digeneralisasi pada semua perusahaan pertambangan dan migas yang ada di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar data-data *sustainability report*

yang dikumpulkan lebih banyak lagi dari tahun ke tahun sehingga hasil analisa akan lebih akurat.

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan konfirmasi dan pengamatan langsung kepada manajemen perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan mengenai aktivitas perusahaan sehingga data-data dan pemahaman yang didapatkan lebih terjamin kebenarannya antara yang dituangkan perusahaan dalam laporan *sustainability* dan kenyataan yang terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *"Ihya' Ulumuddin jilid 4"*. Jakarta: Republika, 2012.
- Asongu, J.J. 2007. *The Legitimacy of Strategic Corporate Social Responsibility as a marketing Tool*. Journal of Business and Public Policy, Vol. 1 No. 1.
- Asia Pasific Philanthropy Consortium. 2002. *Investing in Ourselves: Giving and Fund Raising in Asia*: 7-8.
- Asyraf, et all. *"Islam dan Ekonomi"*. Kuala Lumpur: University Malaysia Terengganu, 2010.
- Becchetti, L., R. Ciciretti, I. Hasan and N. Kobeissi. 2012. *Corporate Social Responsibility and Shareholder's Value*. Journal of Business Research 65 (2012) 1628–1635.
- Bichta, C. 2003. *Corporate Social Responsibility: A Role in Government Policy and Regulation?*. CRI Research Paper No.16.
- Chariri, Anis. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Paper Disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009.
- Deegan, C. 2002. *The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure – A Theoretical Foundation*. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 15, No. 3.
- Deegan, et al. 2002. *An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure of BHP from 1983-1997, A Test of Legitimacy Theory*. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 15, No. 3, Hal. 312-343.
- Dewi, I Gusti Ayu Agung Omika. *Dialektika Dan Refleksi Kritis Realitas "Sustainability" Dalam Praktik Sustainability Reporting: Sebuah Narasi Habermasian*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 7 - No. 2. (Desember). 2010. Hlm.140.
- Dewi, I Gusti Ayu Agung Omika Dewi, Dkk. *Dialektika Dan Refleksi Kritis Realitas "Sustainability" Dalam Praktik Sustainability Reporting: Sebuah Narasi Habermas*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh. 2011.
- Dincer, B. 2011. *Do the Shareholders Really Care about Corporate Social Responsibility?*. International Journal of Business and Social Science 2 (10) : 71-76.

- Fluitman, F. 2002. *Labour Market Policies, an Introductory Presentation*. Turin: ILO.
- Fulcher, J. 2004. *A Very Short Introduction to Capitalism*. Oxford University Press.
- Garriga, E. and Mele, D. 2004. *Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory*. Journal of Business Ethics Vol. 53: 51-73.
- Giddens, Anthony. 1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge, UK: Polity.
- Greenwood, Michelle. and Eve Anderson. (2009). *I Used to be an Employee but Now I am a Stakeholder: Implications of Labelling Employees as Stakeholders*. Asia Pacific Journal of Human Resources, 47(2).
- Gulsevrim. Y. G. and Gokhan. S. G., 2009. *Corporate Social Responsibility Practices of the Texile Firm Quted in Istabul Stock Exchange*. International Journal of Business, Economics, Finance and Management Sciences.
- Habermas, Jürgen. 1983. *"The Theory of Communicative Action, Vol 1: Reason & the Rationalization of Society"*. Boston: Beacon Press.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu: Yogyakarta, hal. 96.
- Handerson, S., and Peirson, G. 2004. *Issues in Financial Accounting*. Frenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pertama Cetakan Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2013), h. 147.
- Jones, M. T. 1996. *Missing the Forest for the Trees: A Critique of the Social Responsibility Concept and Discourse*. Business and Society, Vol. 35(7): 7-41.
- Kotler, Philip and Lee, Nancy. 2005. *"Corporate Social Responsibility : Doing the Most Good for Your Company and Your Cause"*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Kotler, P. 2007. *Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New York, Thomas Dunne Books.
- Letmathe, Peter Brabeck. 2009. *The Nestle Concepts of Corporate Social Responsibility: as implemented in Latin America*.
- Linda and Jenny Fairbrass. 2008. *'Corporate Social Responsibility (CSR) Models and Theories in Stakeholder Dialogue'*. CRRC. Queen's University Belfast.

- Meutia, Inten. 2010. *Shariah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah*. Disertasi Tidak Dipublikasikan, Doktor Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya.
- Meutia, Inten., M. Sudarma, I. Triuwono, and U. Ludigdo. 2010. *Qualitative Approach To Build The Concept Of Social Responsibility Disclosures Based On Shari'ah Enterprise Theory*. Faculty Of Economic, Accounting Department, Univercity Of Sriwijaya. Indonesia.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mousa, Gehan. A., Naser T. Hassan. 2015. *Legitimacy Theory and Environmental Practices: Short Notes*. International Journal of Business and Statistical Analysis ISSN (2384-4663) Int. J. Bus. Stat. Ana. 2, No. 1.
- Mukhazir, Muhammad, and Noordin. "Corporate Social Responsibility Disclosure: A Tawhidic Approach". Jurnal Syariah, 14-1, 2006, pp. 125-142.
- Naraduhita, D. C. dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2012. *Corporate Social Responsibility: Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan*. Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No. 2/Mei 2012: 95-189.
- Nik Mustapha. "Pendekatan Keadilan Sosial Dalam Membangun Negara" dalam *keadilan sosial dari persepektif Islam*. Penyuting Khairul Azhar Idris. Kuala Lumpur, MPH Group Printing (M) sdn bhd. 2007.
- Norajilah Binti Chie Man. "Tanggungjawab Sosial Korporat: Analisis Perbandingan Di Bank Muamalat Malaysia Berhad Dan Affin Bank Berhad". Disertasi Master Syariah Dan Ekonomi, Universiti Malaya, Kuala Lumpur 2011.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cet. ke-XXI; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi. 1995. *Accounting Language Change: A Critical Study of Habermas's Theory of Communicative Action*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Department of Accounting and Finance, University of Wollongong.

- Sharma S., Sharma J., dan Devi A. 2009. *Corporate Social Responsibility: The Key Role of Human Resources Management*. Business Intelligence Journal. Vol.2.No.1.
- Slamet, M. 2001. *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis pada Konsep Akuntansi Syari'ah)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Malang: Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Rahardjo, M. 2010. *Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Malang: UIM..
- Rahayu, S. Ludigdo, U., dan Affandy, D. 2007. *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan APBD Bukti Empiris di SKPD Propinsi Jambi*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 10 Makasar, 26-28 Juli.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi. *Bahasa Akuntansi Dalam Praktik: Sebuah Critical Accounting Study*. TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). Vol.6. No.2. 2005.
- Susanto, A. B. 2007. *Corporate Social Responsibility*. The Jakarta Consulting Group. Jakarta.
- Tahir, Muh. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Triyuwono, Iwan. 2003. *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syaria'ah*. IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 4, No. 1, h. 79-90. Diakses tanggal 15 September 2011 dari (<http://journal.uui.ac.id>)
- Triyuwono, Iwan. 2007. *Mengangkat 'Sing Liyan untuk Formasi nilai Tambah Syariah*. SNA X UNHAS 26-28 JULI 2007. Makassar.
- Yani, Bani. 2007. *Filantropi dan Kapitalisme*. Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani "Galang", Vol. 2 No. 3 Agustus 2007. Diterbitkan oleh PIRAC bekerja sama dengan Ford Foundation.
- Waldman, David. 2009. *"Corporate Social Responsibility: What it really is, Why it's so important, and How it should be managed"*. School of Global Management and Leadership. Arizona State University.
- Wibison, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Wood, D. J. 1991. *Corporate Social Performance Revisited*. The Academy of Management Review Vol. 16(4): 691-718.
- Global Reporting Initiative (GRI): Sustainability Reporting Guidelines Versi 4.0.
- Sustainability Report* PT. Bumi Asam (Persero) Tbk. tahun 2014.

*Sustainability Report* PT. Bumi Asam (Persero) Tbk. tahun 2015.

*Sustainability Report* PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. tahun 2014.

*Sustainability Report* PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. tahun 2015.

*Sustainability Report* PT. Freeport Indonesia tahun 2014.

*Sustainability Report* PT. Freeport Indonesia tahun 2015.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[http://www.kompasiana.com/zaelani\\_ma/corporate-social-responsibility-csr-transformasi-wajah-kapitalisme\\_551783d8a333115107b65e46](http://www.kompasiana.com/zaelani_ma/corporate-social-responsibility-csr-transformasi-wajah-kapitalisme_551783d8a333115107b65e46). Diakses pada: 11 September 2012 01:21:00 dan Diperbarui: 24 Juni 2015 17:37:51.

[http://www.kompasiana.com/gucialkampari/praktek-csr-kontra-kapitalisme\\_58aa575d719773263809d9da](http://www.kompasiana.com/gucialkampari/praktek-csr-kontra-kapitalisme_58aa575d719773263809d9da). Diakses pada: 20 Februari 2017 09:41:33 dan Diperbarui: 20 Februari 2017 10:13:23.

<http://regional.kompas.com/read/2012/05/16/08502392/Pasir.Sisa.Tambang.Freeport.Patut.Diwaspadai>. Diakses pada: Rabu, 16 Mei 2012 pukul 08:50 WIB.

<http://www.antaranews.com/berita/25966/klh-laporan-evaluasi-amdal-freeport-tidak-ada-masalah>. Diakses pada: Selasa, 10 Januari 2006 pukul 11:00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan)

## RIWAYAT HIDUP



ANDI FACHRUL ALAMSYAH, dilahirkan di Kota Ujung Pandang yang sekarang berganti nama menjadi Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 07 Juni 1994. Penulis merupakan putra kedua dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Andi Ruslan dan Nurlaila Yusran. Penulis memulai pendidikan pada TK Asyiah Makassar pada tahun 1999. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri Mangkura III Makassar pada tahun 2000 hingga tahun 2003 dan berpindah ke SD Inp. Toddopuli I Makassar pada tahun 2003 sampai 2006, lalu melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 8 Makassar pada tahun 2006 hingga tahun 2009. Pada tahun tersebut juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK Negeri 03 Makassar hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan menyelesaikan studi S1 pada tahun 2017. Selain mengikuti proses pembelajaran, penulis juga pernah tergabung dalam organisasi di dalam maupun luar sekolah dan kampus, diantaranya; Palang Merah Remaja SMPN 8 Makassar, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMKN 3 Makassar, dan Saka Byayangkara Marchingband.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R